



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/ 2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

PIETER NARDTY THENU, lahir di Padang , umur 43 Tahun / 10 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Kejaksaan Agung Jl.Kejaksaan IV Tengah no. 15B, Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASBULLAH,SH.,MH., dkk., para Advokat dari Kantor Advokat Gold & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Gedung Satrio Tower LT. 13 unit 5-7, Jl.Prof .Satrio Blok C-4, no. 5 RT.0/02, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik,dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Juli 2023 s/d. 19 Agustus 2023.
- Penuntut Umum, dengan jenis TAHANAN KOTA, sejak 1 Agustus 2023 s/d. 20 Agustus 2023.
- Penuntut Umum /Perpanjangan Ketua PN, sejak 21 Agustus 2023 s/d.19 September 2023. (tahanan Kota).
- Hakim pengadilan Negeri dengan jenis Tahanan Kota, sejak 24 Agustus 2023 s/d. 22 September 2023.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa PIETER NARDTY THENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-**

Hal. 1 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dan menimbulkan kerugian” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PIETER NARDTY THENU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari saksi/korban ARIS SETYANTO NUGROHO

1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016
2. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat senilai Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)
3. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: Set.021/YS/UM/ 01/2016 tanggal 19 Januari 2016;
4. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana tanggal 15 Nopember 2018 perihal Ucapan Terimakasih;
5. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana Nomor: 01/294/V/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Dispensasi Mahasiswa Pada Acara Syuting MetroTV “Hari Pendidikan Nasional”.
6. Asli Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 29 Juni 2020;
7. Asli SPPT-PBB a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO NOP: 31.73.020.001.012-0073.0 tanggal 16 April 2020;
8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: HP.03.03/1108-31.71/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Informasi Atau Status Bidang Tanah;
9. Asli Tindakan Slip Setoran Bank BCA tanggal 14 Maret 2018 dari No. Rek 2211272980 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI ke No. Rek 5035180149 a.n. CAHNDRA GUNAWAN senilai Rp. 1.721.968.250,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
10. Asli Paspor Republik Indonesia No. A6804057 tanggal 7 November 2013 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.

Dari saksi a.n. MEISSIE PHOLUAN, S.H.

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli No: 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No: 05 tanggal 10 Juni 2016 diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.

Hal. 2 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3173042805780009 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3172012809110049 a.n. Kepala Keluarga Ir. SANTOSO HALIM.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 07.653.213.4-033.000 a.n. SANTOSO HALIM.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Tambahan Sidik Jari (Para) Penghadap a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171072402690007 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171075502730003 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI, NPWP No. 73.654.642.5-077.000 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dan NPWP No. 06.699.380.9-077.000 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 13 Januari 2011 a.n. Kepala Keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 11.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Nikah No. 717/46/III/1997 tanggal 17 Maret 1997.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT a.n. Wajib Pajak ARIS SETYANTO NUGROHO tanggal 11 Januari 2016 dengan NOP 31.73.020.001.012.0073.0.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran Pajak Penjual tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 44.329.140.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran BPHTB tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 846.000.000

Dari saksi JANE SUTEJA

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (Modal Kerja dan Investasi) Bank UOB tanggal 22 April 2019.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2019 tanggal 25 Juli 2019 diterbitkan oleh PPAT R. SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO, S.H., M.Kn.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 1702/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

Hal. 3 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Kredit Nomor: 69 tanggal 17 November 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor: 54 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 30 tanggal 7 April 2017 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 59 tanggal 13 April 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 73 tanggal 17 Mei 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 19 tanggal 19 Juni 2019 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M berikut fotocopy legalisir lampiran Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia.
- 11.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 16 tanggal 23 Desember 2020 diterbitkan oleh Notaris NGESTIRINI BASOEKI, S.H.
- 12.1 (satu) eksemplar asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. Ir. SANTOSO HALIM seluas 664 M2 berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.

Dari saksi LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir minuta akta dan salinan akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lembar tambahan sidik jari (para) panghadap Nomor Akta 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. SANTOSO HALIM, NIK: 3173042805780009.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3172012809110049 an kepala keluarga IR. SANTOSO HALIM.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta perkawinan No. AK.5000294716 an. SANTOSO HALIM dengan FITRIAGUSTIN TJANDRA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Prov. DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2009.

Hal. 4 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP nomor: 07.653.213.4-033.000 an. SANTOSO HALIM.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. ARIS SETYANTO NUGROHO, NIK: 3171072402690007.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. RR. NURUL WURYANDANI NIK: 3171075902730003 NPWP nomor: 73.654.642.5-077.000 an. RR. NURUL WURYANDANI, NPWP nomor: 06.699.380.9-077.000 an. ARISSETYANTO NUGROHO
9. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Nikah dengan nomor: 717/46/III/1997 an. IR ARISSETYANTO NUGROHO dengan RR. NURUL WURYANDANI, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung tanggal 17 Maret 1997
- 10.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3171072401090484 an. kepala keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.

Dari saksi a.n. RITCHIE KELVIN LUMENTA;

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO Nomor: SK.MAGI-FIN/16/023 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 029/SPK/Jtrust/BDM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ditujukan kepada PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO perihal Surat Penegasan Kredit (SPK)
3. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 40 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
4. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 41 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com;
5. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 42 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penawaran Kredit Nomor: 104/SPK/JTRUST/CBD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
7. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1034/CA/III/17/006 tanggal 20 Maret 2017.
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 22 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.

Hal. 5 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.

10.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 073/Jtrust/CSME/JKT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Surat Keterangan Lunas.

11.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 153/Jtrust/Roya-LBS/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan.

Dari saksi HARI SETYAWAN, S.E.

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penilaian No: FSR/SR-FS/06.0794/2016 tanggal 13 Juni 2016 oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan terhadap rumah tinggal di Jl. Tasikmalaya No.15, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat a.n. SANTOSO HALIM.

2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat dari KJPP Felix Sutandar & Rekan Ref No: 080/FSR/Spn-Wn/0306 tanggal 03 Juni 2016 perihal lingkup penugasan dan proposal jasa penilaian asset

Dari saksi a.n. ENDO KURNIADI

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 atas nama Ir. SANTOSO HALIM.

Dari Tersangka R.R. NURUL WURYANDANI

1. Print out rekening koran rekening BNI a.n. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 0394357881.

2. 1 (satu) bundel print out rekening koran rekening BCA a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 8780919273.

3. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 003/SOM/MS-ASN/IV/18 tanggal 12 April 2018 perihal Surat Somasi.

4. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 005/SOM/MS-ASN/V/18 tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Somasi II.

5. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 035/SOM/MS-ASN/VII/19 tanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Pengosongan.

(Keseluruhan Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara RR. NURUL WURYANDANI)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIETER NARDTY THENU tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak van gewijsde), atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan.membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RR. NURUL WURYANDANI, saksi LUSI INDRIANI, SH., M.Kn (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. SANTOSO HALIM (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 10 Juni 2016, 14 Juni 2016 dan 16 Juni 2016 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dan menimbulkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2014, RR. NURUL WURYANDANI dikenalkan dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO) oleh kakak RR. NURUL WURYANDANI yakni saksi R. HADI MURHANDANU Als BOBI, kemudian pada tahun 2016 MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI menghubungi RR. NURUL WURYANDANI melalui telepon kemudian menawarkan RR. NURUL WURYANDANI untuk kerjasama bisnis di bidang properti dengan komitmen bagi keuntungan atau hasil sebesar 70% untuk terdakwa dan 30% untuk MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI.

Hal. 7 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan penjelasan dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, RR. NURUL WURYANDANI merasa tertarik untuk menjalankan bisnis tersebut dan menerima ajakan kerjasama itu yakni berupa kerjasama bisnis properti antara RR. NURUL WURYANDANI dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI yang saat itu hanya berupa perjanjian lisan saja dan tidak tertuang dalam perjanjian bisnis, namun saat itu RR. NURUL WURYANDANI mengatakan kepada MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI bahwa RR. NURUL WURYANDANI tidak memiliki modal untuk ikut bisnis, kemudian MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI merayu RR. NURUL WURYANDANI agar menggunakan sertifikat rumah RR. NURUL WURYANDANI di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat untuk dijadikan modal (dijaminkan) kepada seseorang kenalan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI yang bisa memberikan pinjaman uang untuk modal bisnis properti tersebut, atas penjelasan tersebut RR. NURUL WURYANDANI pun menerima masukan dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI dan akan menggunakan sertifikat rumah milik ARIS SETYANTO NUGROHO dengan SHM No. 1088/Menteng yang mana ARIS SETYANTO NUGROHO merupakan suami dari RR. NURUL WURYANDANI dan sertifikat tersebut akan digunakan oleh RR. NURUL WURYANDANI sebagai jaminan untuk mendapatkan modal.
- Kemudian sekira bulan Mei 2016, MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI mengajak RR. NURUL WURYANDANI menuju ke Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan, kemudian RR. NURUL WURYANDANI dikenalkan dengan Terdakwa melalui saksi FAESHAL RIZA ERLANGGA, pada saat itu RR. NURUL WURYANDANI menyampaikan maksud kedatangannya adalah ingin meminjam uang, lalu Terdakwa menyanggupi akan membantu dengan mengatakan kepada RR. NURUL WURYANDANI bahwa ia punya "big boss" yakni Ir. SANTOSO HALIM, kemudian Terdakwa juga mengatakan nanti Ir. SANTOSO HALIM yang akan memberikan uang kepada RR. NURUL WURYANDANI dalam bentuk cek tunai, namun Ir. SANTOSO HALIM mengatakan peminjaman uang tersebut dengan syarat harus ada jaminan.
- Oleh karena RR. NURUL WURYANDANI dimintai syarat tersebut oleh Ir. SANTOSO HALIM maka timbullah niat jahat RR. NURUL WURYANDANI untuk mengambil dokumen asli berupa Sertifikat Hak Milik Rumah dari brankas rumah RR. NURUL WURYANDANI tanpa sepengetahuan saksi ARIS SETYANTO NUGROHO (suami RR. NURUL WURYANDANI). Sertifikat tersebut adalah milik saksi ARIS SETYANTO NUGROHO yang merupakan Warisan dan terletak di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng Jakarta Pusat.
- Kemudian setelah sertifikat SHM No. 1088/Menteng a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO (saksi korban) diambil oleh RR. NURUL WURYANDANI, selanjutnya

Hal. 8 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sertifikat tersebut di fotocopy untuk di tunjukkan kepada Ir SANTOSO HALIM.

- Selanjutnya masih sekitar bulan Juni 2016, RR. NURUL WURYANDANI dan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTFI kembali mendatangi Gedung Cyber untuk bertemu lagi dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Ir SANTOSO HALIM bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan *sistem pengembalian / buyback dengan jangka waktu* dan nanti akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Akta Pengitakan Jual Beli (APJB) di hadapan Notaris, atas iming-iming dari saksi Ir SANTOSO HALIM tersebut kemudian RR. NURUL WURYANDANI menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta agar RR. NURUL WURYANDANI datang kembali ke Gedung Cyber dengan membawa serta suaminya ARIS SETYANTO NUGROHO yaitu sebagai pemilik asset dan nama yang tertera dalam dokumen SHM No. 1088/Menteng, dan membawa semua dokumen-dokumen asli pendukung berikut fotokopinya yaitu SHM No. 1088/Menteng, KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, dan lain-lain.
- Oleh karena RR. NURUL WURYANDANI tidak meminta izin kepada saksi ARIS SETYANTO NUGROHO untuk menjadikan SHM tersebut sebagai jaminan, maka timbullah niat jahat RR. NURUL WURYANDANI dan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTFI untuk mencari pemeran pengganti untuk berpura-pura sebagai suami RR. NURUL WURYANDANI yaitu saksi ARIS SETYANTO NUGROHO di hadapan Notaris, agar pinjaman tersebut dapat diberikan kepada RR. NURUL WURYANDANI.
- Kemudian untuk memuluskan permufakatan jahat tersebut, agar mendapatkan uang dari Ir SANTOSO HALIM kemudian RR. NURUL WURYANDANI yang seharusnya membawa suaminya yaitu ARIS SETYANTO NUGROHO ternyata membawa orang lain untuk berpura-pura menjadi ARIS SETYANTO NUGROHO suami RR. NURUL WURYANDANI yang merupakan pemilik sertifikat yang sebenarnya dengan peran pengganti yaitu sdr SIGI (DPO), dan pada saat pertemuan tersebut langsung dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB)
- Bahwa ternyata Sdr. SIGI yang berpura-pura menjadi ARIS SETYANTO NUGROHO (saksi korban) secara fisik sangat berbeda jauh dengan ARIS SETYANTO NUGROHO, karena Sdr. SIGI masih sangat muda dan terpaut jauh umurnya dengan ARIS SETYANTO NUGROHO, sehingga semua dokumen-dokumen yang digunakan dalam pertemuan itu menggunakan data-data ARIS SETYANTO NUGROHO namun wajah yang digunakan adalah wajah saudara SIGI sebagaimana terlihat dalam foto berikut :

Hal. 9 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa, Ir SANTOSO HALIM, saksi LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn dan saksi RR. NURUL WURYANDANI terkait SHM milik saksi korban **ARIS SETYANTO NUGROHO**, masih berlanjut yaitu dengan cara :
 1. Menggunakan Jasa Kantor KJPP FELIX SUTANDAR sebagai kantor penilai yang ditunjuk oleh Ir. SANTOSO HALIM untuk melakukan penilaian di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, namun KJPP tersebut tidak melaksanakan Survey dengan benar sebagaimana SOP yang berlaku, Penilaian ini hanya Formalitas dibuat untuk dapat mengajukan Kredit ke Bank J Trust.
 2. Menggunakan Jasa saksi Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn yang berkantor di Ruko Marcella III Jln. Pondok Betung Raya No. 9 Lt. 2 Bintaro Sektor 3A Kota Tangerang Selatan 15225, padahal Pengikatan Jual Beli dilakukan di Gedung Cyber Mampang Jakarta Selatan diluar Wilayah Kerja Saksi LUSI INDRIANI, S.H.M.Kn.;
 3. Akta Pengikatan Jual Beli yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016, yang merupakan APJB lunas sekaligus Kuasa Jual yang diberikan oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO kepada Ir. SANTOSO HALIM atas objek tanah SHM No: 1088/Menteng a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO, yang beralamat di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, padahal R R NURUL WURYANDANI tidak pernah ada niatan untuk menjual Tanah yang berlokasi di Jalan Tasikmalaya No.15 Menteng tersebut kepada terdakwa.
 4. Akta Pengikatan Jual Beli dilakukan di Gedung Cyber Mampang Jakarta Selatan, dan Akta Pengikatan Jual Beli ini dibuat dengan Lunas, padahal faktanya belum lunas dan uang yang digunakan untuk diberikan kepada R R NURUL WURYANDANI menggunakan uang yang didapat Ir SANTOSO HALIM setelah menjaminkan Sertifikat SHM No. 1088/Menteng ke Bank J Trust.
 5. Menggunakan Jasa saksi Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik SHM No. 1088/Menteng ke Badan Pertanahan Jakarta Pusat dengan memberikan biaya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus

Hal. 10 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) supaya bisa balik nama selesai dalam 1 hari untuk bisa segera mengajukan kredit ke Bank J Trust, termasuk namun tidak terbatas diberikan kepada Badan Pertanahan Jakarta Pusat.

6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tertera pada Surat Perjanjian tersebut, RR. NURUL WURYANDANI telah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), padahal RR. NURUL WURYANDANI baru menerima uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Ir SANTOSO HALIM.
7. Secara aktif dan sadar sejak Tanggal 10 Juni 2016 hingga 19 Juni 2016, Ir SANTOSO HALIM dengan berbagai upaya memuluskan skenarionya agar dapat menguasai Tanah yang berlokasi di Jalan Tasikmalaya N0.15 Menteng Jakarta Pusat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama, Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli, Balik Nama Ke Badan Pertanahan Negara Jakarta Pusat hingga mengajukan Kredit Ke Bank J Trust dengan niat jahat dan bujuk rayu kepada RR. NURUL WURYANDANI agar mau menyerahkan SHM No. 1088/Menteng dan mendapatkan keuntungan dari Bank J Trust sebesar Rp Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
8. Menerima Uang sebesar Rp 44.329.140,- (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) ke rekening BCA dengan No. Rek 5035070599 atas nama Ir. SANTOSO HALIM dari RR NURUL WURYANDANI, untuk beban uang jasa Notaris yang dibagi dua antara RR NURUL WURYANDANI dengan Ir SANTOSO HALIM, padahal Faktanya uang jasa Notaris yang dibayarkan kepada saksi LUSI INDRIANI S,H.,M.Kn adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).
9. Pada tanggal 15 Juni 2016 Ir SANTOSO HALIM mengajukan perubahan kepemilikan SHM No. 1088/Menteng ke BPN Jakarta Pusat dan pada tanggal 16 Juni 2016 SHM No. 1088/Menteng berubah kepemilikan menjadi atas nama Ir SANTOSO HALIM. Dalam proses pengajuan tersebut, Ir SANTOSO HALIM menerangkan bahwa objek jual beli (SHM No. 1088/Menteng) tidak dalam jaminan suatu hutang piutang, sedangkan faktanya bahwa SHM No. 1088/Menteng menjadi jaminan hutang R.R. NURUL WURYANDANI dengan Ir SANTOSO HALIM.
10. Menggunakan jasa LAW FIRM MARIA SILALAH, Sdr. AHMAD FAIZAL dan Partners yang beralamat Jln. Kuningan Barat No. 8 Gedung Cyber Lt. 5 (inet) Kuningan-Jaksel No. HP 081315315825 mengatasnamakan Ir. SANTOSO HALIM untuk mengirimkan Somasi yaitu:
 - 1) Surat Nomor: 002/SH/MS-ASN/III/18 tanggal 8 Maret 2018 perihal Surat Hibauan;

Hal. 11 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Nomor: 003/SOM/MS-ASN/IV/18 tanggal 12 April 2018 perihal Surat Somasi;
- 3) Surat Nomor: 005/SOM/MS-ASN/V/18 tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Somasi II;
- 4) Surat Nomor: 035/SOM/MS-ASN/VII/19 tanggal 15 Juli 2018 perihal Surat Pengosongan.

Yang isinya intinya mengingatkan RR NURUL WURYANDANI untuk melakukan pembelian kembali lahan dan rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, jika tidak maka kepemilikan rumah akan beralih kepada Ir SANTOSO HALIM, Padahal FAKTANYA Sejak Tanggal 16 Juni 2016 atau berselisih 6 hari sejak Akta Pengikatan Jual Beli di tandatangani, kepemilikan sudah beralih kepada Ir SANTOSO HALIM.

- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli, Terdakwa mengatakan kepada RR. NURUL WURYANDANI bahwa ini pinjam meminjam tapi akad yang dilaksanakan adalah Pengikatan Jual Beli, sehingga kemudian RR. NURUL WURYANDANI menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 tersebut.
- Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa Akta Pengikatan Jual Beli ini adalah hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan Tanah milik saksi korban ARIS karena perjanjian ini sejak awal diketahui belum lunas, namun dibuat Lunas dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 sehingga dapat segera dimiliki oleh Ir SANTOSO HALIM karena tanggal 19 Juni 2016 sudah beralih nama menjadi milik Ir. SANTOSO HALIM, dan Terdakwa mengatakan Nilai Rp 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar) adalah harga yang sangat tidak wajar untuk membeli rumah di Jln. Tasikmalaya No.15 Menteng, lebih jauh Terdakwa juga menerima keuntungan berupa :

- 1) Tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954;
- 2) Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954;
- 3) Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954;

Hal. 12 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954.
- 5) Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) yang merupakan itu merupakan success fee untuk saksi PIETER yang ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank BCA
- Bahwa Keterangan palsu pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :
 1. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 (satu) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 :

Pasal 1

Jual beli tanah tersebut akan dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), jumlah yang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tersebut, pihak pertama dengan ini memberikan bukti pelunasannya, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

Kalimat "..... jumlah yang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tersebut, pihak pertama dengan ini memberikan bukti pelunasannya" adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena nilai transaksi sebenarnya adalah Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Dan kalimat yang menerangkan "..... jumlah yang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani" juga merupakan keterangan tidak sesuai dengan sebenarnya, karena pada saat akta ditandatangani terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada R.R. NURUL WURYANDANI,

2. Pada penutup Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016, berbunyi:

----- Demikian Akta Ini -----

Hal. 13 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari ini dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri :

- a. Nona RIKA CAHYA UMBARA,dst.
- b. Tuan IRSAN MARADONA,dst.

Isi penutup Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 tidak sesuai dengan sebenarnya, karena Akta Pengikatan Jual Beli tersebut ditandatangani di Gedung Cyber I Mampang-Jakarta Selatan bukan di Tangerang Selatan, dan RIKA CAHYA UMBARA serta IRSAN MARADONA tidak hadir menyaksikan pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, hal tersebut dilakukan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn karena wilayah kerjanya berada di Tangerang Selatan bukan di Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi ARIS SETYANTO NUGROHO tidak pernah bertemu dengan Ir. SANTOSO HALIM, Terdakwa, Notaris LUSI INDRIAYANI, S,H.M.Kn apalagi hadir dalam semua pertemuan yang terjadi di Gedung Cyber Mampang Jakarta Selatan, APALAGI menandatangani SPK tanggal 10 Juni 2016 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016, dan Akta Jual Beli No. 3/2016, sehingga kesemua dokumen itu berisi keterangan yang tidak benar/palsu.
- Bahwa saksi ARIS SETYANTO NUGROHO tidak mengetahui kalau RR. NURUL WURYANDANI telah menjadikan SHM No: 1088/Menteng atas nama Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai jaminan pinjaman modal kepada Ir. SANTOSO HALIM, yang mana RR. NURUL WURYANDANI melakukannya diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ARIS SETYANTO NUGROHO yang juga merupakan suami dari RR. NURUL WURYANDANI, karena pengaruh dan iming-iming yang kuat dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI.
- Bahwa RR. NURUL WURYANDANI tidak diberikan salinan atau photo copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016, karena semua dokumen dipegang oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, akan tetapi akhirnya saksi ARIS SETYANTO NUGROHO bisa mendapatkan dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI setelah saksi ARIS SETYANTO NUGROHO meminta kepada MAULVY PARAMA ARTHA dengan proses permintaan yang sangat sulit hingga akhirnya MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI mau menyerahkannya setelah saksi ARIS SETYANTO NUGROHO membayar kompensasi kepada MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Nomor 8780381974 atas nama MAULVY PARAMA ARTHA.

Hal. 14 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut dikirim oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI melalui kurir JNE tanggal 16 Juli 2019, berikut photo copy asli SHM No. 1088/Menteng milik saksi ARIS SETYANTO NUGROHO dan asli tindasan kwitansi tanggal 10 Juni 2016 yang isinya seolah-olah saksi ARIS SETYANTO NUGROHO telah menerima uang sebesar Rp. 17 Milyar dari Ir. SANTOSO HALIM untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, padahal saksi ARIS SETYANTO NUGROHO tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan tandatangan yang tertera di kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi ARIS SETYANTO NUGROHO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SANTOSO HALIM, RR. NURUL WURYANDANI, dan saksi Notaris LUSI INDRIAYANI, SH., M.Kn tersebut, korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya mengalami kerugian materil hilangnya Sertifikat Hak Milik No 1088/Menteng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RR. NURUL WURYANDANI, dan saksi LUSI INDRIANI, SH., M.Kn (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. SANTOSO HALIM (DPO) pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 16 Juni 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Gedung Cyber, Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sekitar tahun 2014, RR. NURUL WURYANDANI dikenalkan dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO) oleh kakak RR. NURUL WURYANDANI yakni saksi R. HADI MURHANDANU Als BOBI, kemudian pada tahun 2016 MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI menghubungi RR. NURUL WURYANDANI melalui telepon kemudian menawarkan RR. NURUL WURYANDANI untuk kerjasama bisnis di bidang properti dengan komitmen bagi keuntungan atau hasil sebesar 70% untuk terdakwa dan 30% untuk MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI.

Hal. 15 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, RR. NURUL WURYANDANI merasa tertarik untuk menjalankan bisnis tersebut dan menerima ajakan kerjasama itu yakni berupa kerjasama bisnis properti antara RR. NURUL WURYANDANI dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI yang saat itu hanya berupa perjanjian lisan saja dan tidak tertuang dalam perjanjian bisnis, namun saat itu RR. NURUL WURYANDANI mengatakan kepada MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI bahwa RR. NURUL WURYANDANI tidak memiliki modal untuk ikut bisnis, kemudian MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI merayu RR. NURUL WURYANDANI agar menggunakan sertifikat rumah RR. NURUL WURYANDANI di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat untuk dijadikan modal (dijaminkan) kepada seseorang kenalan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI yang bisa memberikan pinjaman uang untuk modal bisnis properti tersebut, atas penjelasan tersebut RR. NURUL WURYANDANI pun menerima masukan dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI dan akan menggunakan sertifikat rumah milik ARIS SETYANTO NUGROHO dengan SHM No. 1088/Menteng yang mana ARIS SETYANTO NUGROHO merupakan suami dari RR. NURUL WURYANDANI dan sertifikat tersebut akan digunakan oleh RR. NURUL WURYANDANI sebagai jaminan untuk mendapatkan modal.
- Bahwa sekira Bulan Mei 2016, MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI mengajak RR. NURUL WURYANDANI menuju ke Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan, kemudian RR. NURUL WURYANDANI dikenalkan dengan Terdakwa melalui saksi FAESHAL RIZA ERLANGGA, pada saat itu RR. NURUL WURYANDANI menyampaikan maksud kedatangannya adalah ingin meminjam uang, lalu Terdakwa menyanggupi akan membantu dengan mengatakan kepada RR. NURUL WURYANDANI bahwa ia punya "big boss" yakni Ir. SANTOSO HALIM, kemudian Terdakwa juga mengatakan nanti Ir. SANTOSO HALIM yang akan memberikan uang kepada RR. NURUL WURYANDANI dalam bentuk cek tunai, namun Ir. SANTOSO HALIM mengatakan peminjaman uang tersebut dengan syarat harus ada jaminan.
- Bahwa kemudian karena diminta syarat tersebut oleh Ir. SANTOSO HALIM maka timbullah niat jahat RR. NURUL WURYANDANI untuk mengambil dokumen asli berupa Sertifikat Hak Milik Rumah dari brankas rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ARIS SETYANTO NUGROHO (suami Terdakwa). Sertifikat tersebut adalah milik saksi ARIS SETYANTO NUGROHO yang merupakan Warisan dan terletak di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah sertifikat SHM No. 1088/Menteng a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO (saksi korban) diambil oleh RR. NURUL WURYANDANI, kemudian

Hal. 16 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sertifikat tersebut di fotocopy untuk di tunjukkan kepada Ir SANTOSO HALIM.

- Bahwa masih sekitar bulan Juni 2016, RR. NURUL WURYANDANI dan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTFI kembali mendatangi Gedung Cyber untuk bertemu lagi dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Ir SANTOSO HALIM bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan *sistem pengembalian / buyback dengan jangka waktu* dan nanti akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) di hadapan Notaris, atas iming-iming dari saksi Ir SANTOSO HALIM tersebut kemudian RR. NURUL WURYANDANI menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta agar RR. NURUL WURYANDANI datang kembali ke Gedung Cyber dengan membawa serta suaminya ARIS SETYANTO NUGROHO yaitu sebagai pemilik asset dan nama yang tertera dalam dokumen SHM No. 1088/Menteng, dan membawa semua dokumen-dokumen asli pendukung berikut fotokopinya yaitu SHM No. 1088/Menteng, KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, dan lain-lain.
- Oleh karena RR. NURUL WURYANDANI tidak meminta izin kepada saksi ARIS SETYANTO NUGROHO untuk menjadikan SHM tersebut sebagai jaminan, maka timbullah niat jahat RR. NURUL WURYANDANI dan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTFI untuk mencari pemeran pengganti untuk berpura-pura sebagai suami RR. NURUL WURYANDANI yaitu saksi ARIS SETYANTO NUGROHO di hadapan Notaris, agar pinjaman tersebut dapat diberikan kepada RR. NURUL WURYANDANI.
- Bahwa kemudian untuk memuluskan permufakatan jahat tersebut, agar mendapatkan uang dari Ir SANTOSO HALIM kemudian RR. NURUL WURYANDANI yang seharusnya membawa suaminya yaitu ARIS SETYANTO NUGROHO ternyata membawa orang lain untuk berpura-pura menjadi ARIS SETYANTO NUGROHO suami RR. NURUL WURYANDANI yang merupakan pemilik sertifikat yang sebenarnya dengan peran pengganti yaitu sdr SIGI (DPO), dan pada saat pertemuan tersebut langsung dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB).
- Bahwa semua dokumen-dokumen seperti KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, dan lain-lain yang digunakan dalam pertemuan itu menggunakan data-data ARIS SETYANTO NUGROHO namun wajah yang digunakan adalah wajah saudara SIGI sebagaimana terlihat dalam foto berikut :



an Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui Akta Pengikatan Jual Beli ini adalah hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan tanah milik saksi ARIS SETYANTO NUGROHO karena perjanjian ini sejak awal diketahui belum lunas, namun dibuat Lunas dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 10 Juni 2016, sehingga dapat segera dimiliki oleh Ir. SANTOSO HALIM karena tanggal 19 Juni 2016 sudah beralih nama menjadi milik Ir. SANTOSO HALIM, dan Terdakwa mengatakan Nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar) adalah harga yang sangat tidak wajar untuk membeli rumah di Jl. Tasikmalaya No. 15 Menteng, kemudian Terdakwa juga menerima keuntungan berupa :
 - 1) Tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954;
 - 2) Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954;
 - 3) Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954;
 - 4) Tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening a.n. PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek BCA 6520161954.
 - 5) Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) yang merupakan itu merupakan success fee untuk saksi PIETER yang ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank BCA.
- Bahwa Keterangan palsu pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :
 1. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 (satu) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 5 tanggal 10 Juni 2016 :

Pasal 1

Jual beli tanah tersebut akan dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), jumlah yang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tersebut, pihak pertama dengan ini memberikan bukti pelunasannya, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

Hal. 18 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Kalimat “..... jumlah yang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tersebut, pihak pertama dengan ini memberikan bukti pelunasannya” adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena nilai transaksi sebenarnya adalah Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Dan kalimat yang menerangkan “..... jumlah yang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani” juga merupakan keterangan tidak sesuai dengan sebenarnya, karena pada saat akta ditandatangani terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada R.R. NURUL WURYANDANI,

2. Pada penutup Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016, berbunyi:

----- Demikian Akta Ini -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari ini dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri :

a. Nona RIKA CAHYA UMBARA,dst.

b. Tuan IRSAN MARADONA,dst.

Isi penutup Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 tidak sesuai dengan sebenarnya, karena Akta Pengikatan Jual Beli tersebut ditandatangani di Gedung Cyber I Mampang-Jakarta Selatan bukan di Tangerang Selatan, dan RIKA CAHYA UMBARA serta IRSAN MARADONA tidak hadir menyaksikan pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, hal tersebut dilakukan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn karena wilayah kerjanya berada di Tangerang Selatan bukan di Jakarta Selatan.

- Bahwa ARIS SETYANTO NUGROHO tidak pernah bertemu dengan Ir. SANTOSO HALIM, Terdakwa, Notaris LUSI INDRIYANI, S.H.M.Kn apalagi hadir dalam semua pertemuan yang terjadi di Gedung Cyber Mampang Jakarta Selatan, APALAGI menandatangani SPK tanggal 10 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016, dan Akta Jual Beli No. 3/2016, sehingga kesemua dokumen itu berisi keterangan yang tidak benar/palsu.
- Bahwa saksi ARIS SETYANTO NUGROHO tidak mengetahui kalau RR. NURUL WURYANDANI telah menjadikan SHM No: 1088/Menteng atas nama Sdr. ARIS

Hal. 19 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANTO NUGROHO sebagai jaminan pinjaman modal kepada Ir. SANTOSO HALIM, yang mana RR. NURUL WURYANDANI melakukannya diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ARIS SETYANTO NUGROHO yang juga merupakan suami dari RR. NURUL WURYANDANI, karena pengaruh dan iming-iming yang kuat dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI.

- Bahwa RR. NURUL WURYANDANI tidak diberikan salinan atau photo copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016, karena semua dokumen dipegang oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, akan tetapi akhirnya saksi ARIS SETYANTO NUGROHO bisa mendapatkan dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI setelah saksi ARIS SETYANTO NUGROHO meminta kepada MAULVY PARAMA ARTHA dengan proses permintaan yang sangat sulit hingga akhirnya MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI mau menyerahkannya setelah saksi ARIS SETYANTO NUGROHO membayar kompensasi kepada MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Nomor 8780381974 atas nama MAULVY PARAMA ARTHA.
- Bahwa kemudian Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut dikirim oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI melalui kurir JNE tanggal 16 Juli 2019, berikut photo copy asli SHM No. 1088/Menteng milik saksi ARIS SETYANTO NUGROHO dan asli tindasan kwitansi tanggal 10 Juni 2016 yang isinya seolah-olah saksi ARIS SETYANTO NUGROHO telah menerima uang sebesar Rp. 17 Milyar dari Ir. SANTOSO HALIM untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, padahal saksi ARIS SETYANTO NUGROHO tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan tandatangan yang tertera di kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi ARIS SETYANTO NUGROHO.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1684/DTF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ROCHANI, S.Kom., M.M.S.I, dkk dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pemeriksaan yaitu disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan ARIS SETYANTO NUGROHO bukti (QT) yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai tempel Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) Nama : Ir. Santoso Halim No. KTP : 3173042805780009 Alamat : Jl. Pluit Permai VIII/2 RT. 007/004 Pluit Penjaringan Jakarta Utara bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama dan Nama: Aris

Hal. 20 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanto Nugroho No. KTP/Identitas : 3171072402690007 Alamat : Jl. Pejompongan Raya No. 19 RT. 011/005 Bendungan Hilir Tanah Abang bertindak selaku atas nama diri sendiri selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua tanggal 19 Juni 2016.

2. 1 (satu) eksemplar Pengikatan Jual Beli bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 05 atas nama Tuan Aris Setyanto Nugroho selaku penjual yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tuan Ir. Santoso Halim selaku pembeli yang untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua yang dibuat di hadapan Lusi Indriani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang tertanggal 10-06-2016;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ARIS SETYANTO NUGROHO Alias ARISSETYANTO NUGROHO Alias Dr. ARISSETYANTO NUGROHO, MM. Alias Dr. Ir. ARISSETYANTO NUGROHO, MM Alias Dr. Ir. ARISSETYANTO NUGROHO, MM., IPU., CMA., MSS. Pembanding (KT).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SANTOSO HALIM, RR. NURUL WURYANDANI, dan saksi Notaris LUSI INDRIAYANI, SH., M.Kn tersebut, korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya mengalami kerugian materil hilangnya Sertifikat Hak Milik No 1088/Menteng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasihat Hukum terdakwa, setelah majelis Hakim mendengar pendapat Jaksa/Penuntut Umum, telah menjatuhkan Putusan Sela pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa PIETER NARDTY THENU.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , R. HADI MURHANDANU,SH., alias BOBY :

Hal. 21 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung RR. NURUL WURYANDANI, saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdri. LUSI INDRIANI maupun sdr. PIETER NARDY THENU.
- Saksi juga tidak kenal dengan sdr. IR. SANTOSO HALIM .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RR. NURUL WURYANDANI bekerja sama dengan sdr. LUTHFI (DPO) dalam proyek pembangunan apartemen di Surabaya, untuk itu maka RR. NURUL WURYANDANI membutuhkan uang untuk proyek tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2016 saksi mendengar cerita kalau rumahnya RR. NURUL WURYANDANI yang terletak di Jl. Tasikmalaya no. 15 Menteng Jakarta Pusat bermasalah, yaitu dijadikan jaminan hutang oleh RR. NURUL WURYANDANI, padahal rumah itu adalah miliknya suami dari RR. NURUL WURYANDANI yang bernama ARIS SETYANTO NUGROHO.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu oleh RR. NURUL WURYANDANI dijadikan jaminan hutang kepada sdr. IR. Santoso Halim.

Saksi-2, FAESHAL REZA ERLANGGA :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdri. LUSI INDRIANI, namun saksi kenal dengan sdr. PIETER NARDY THENU karena sama-sama kerja di Gedung Cyber-2 Mampang Prapatan- Jakarta Selatan, pekerjaan saksi dan sdr. PIETER kadang-kadang adalah sebagai mediator orang yang butuh dana cepat.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. RR. NURUL WURYANDANI sekira awal 2016, saat itu saksi berada di kantin Gedung Cyber-2 bertemu dengan teman saksi bernama YANCE, waktu itu YANCE memperkenalkan 2 (dua) orang temannya bernama RR. NURUL WURYANDANI dan sdr. LUTHFI, dari pembicaraan intinya RR. NURUL WURYANDANI butuh dana sekitar 15 miliar untuk keperluan proyek apartemen di Surabaya.
- Bahwa kemudian RR. NURUL WURYANDANI dipertemukan dengan sdr. PIETER berkaitan dengan kebutuhan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan jaminan hutang berupa sertifikat tanah nomor 1088/ Menteng.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sekitar tahun 2017, RR. NURUL WURYANDANI datang ke Gedung Cyber katanya ingin bertemu PIETER mau bayar cicilan hutangnya.
- Bahwa saksi menerima fee dari sdr. PIETER berkaitan dengan pinjaman uang RR. NURUL WURYANDANI sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) , namun saksi tidak mengetahui cara menghitung fee tersebut, saksi hanya ditransfer uang sejumlah tersebut oleh PIETER.

SAKSI-3, HILDA KARMILA :

Hal. 22 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah asisten Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
- Bahwa tugas saksi adalah antara lain membantu khususnya di lapangan, seperti pengurusan balik nama, pengecekan sertifikat di BPN dan pengurusan validasi pajak, sesuai perintahnya Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn..
- Bahwa Wilayah kerja Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris adalah di Kota Tangerang Selatan, dan kantornya beralamat di Ruko Marcella III Jln. Pondok Betung Raya No. 9 Lt. 2 Bintaro Sektor 3A Kota Tangerang Selatan 15225.
- Bahwa Saksi mengenali Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, karena saksi hadir dan menyaksikan proses penandatanganannya.
- Bahwa penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Gedung Cyber I Lt. 1 Mampang, Kuningan-Jakarta Selatan, yang merupakan kantor milik Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa pada proses penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tersebut dihadiri oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan istrinya Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI, Sdr. Ir. SANTOSO HALIM, PIETER NARDTY THENU, LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn dan saksi.
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut ditandatangani oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai Penjual, Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI sebagai istri dari Penjual dan Sdr. Ir. SANTOSO HALIM sebagai Pembeli, dan sebagai saksi yang hadir dan ikut menyaksikan proses tersebut adalah saksi dan Sdr. PIETER NARDTY THENU. Sedangkan Sdri. RIKI CAHYA UMBARA dan Sdr. IRSAN MARADONA yang keduanya merupakan staf Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn tidak hadir pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenali dan tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 antara sdr. RR. NURUL dengan sdr. IR. SANTOSO HALIM, saksi tidak tahu bagaimana proses penerbitan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut.
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu apakah Pihak Penjual telah menerima dengan tunai dan sempurna uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) dari Pihak Pembeli sesuai dengan APJB No. 5 tanggal 10 Juni 2016 tersebut karena saksi tidak mengikuti dari awal dan tidak mengetahui secara rinci terkait proses pembayaran tersebut.

Hal. 23 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa jual beli tersebut belum lunas dengan adanya termin-termin pembayaran, saksi tidak begitu konsentrasi pada hal tersebut, karena pada saat itu saksi hanya diminta untuk menemani Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. menyarankan kepada para pihak kalau memang pembayaran akan dilakukan secara bertahap maka seharusnya dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli bertahap.
- Bahwa saksi tidak ingat kondisi dan posisi para pihak yang hadir pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 tersebut, yang jelas saksi datang sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah ruang tunggu, di depannya ada ruang rapat, kemudian beberapa waktu kemudian saksi lupa tepatnya, saksi melihat Ir. SANTOSO HALIM masuk ke dalam ruang rapat dan menyapa saksi dan LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, melihat Ir. SANTOSO HALIM masuk lalu saksi dan LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn pun ikut masuk, di dalam ruangan saksi melihat sudah ada Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI, terkadang saksi keluar ke toilet, kemudian saksi keluar ruangan untuk terima telepon, dan saksi juga lebih sering memainkan HP selama proses penandatanganan berlangsung. Sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn meninggalkan ruangan tersebut dan pulang.
- Bahwa ada dokumen berupa foto para pihak yang membuat Akta PPJB, dan saksi membenarkan bahwa dalam foto tersebut ada Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI selaku pihak penjual.
- Bahwa benar wanita pada foto adalah Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI yang menandatangani minuta akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 di Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan, akan tetapi untuk lelaki yang ada pada gambar tersebut bukan laki-laki yang datang menghadap Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. pada saat penandatanganan minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016, laki-laki yang ada pada gambar sangat berbeda dengan orang yang menghadap Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. dan pada saat itu orang tersebut mengaku sebagai suami dari Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI.
- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang datang menghadap Notaris Lusi pada saat menandatangani minuta akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 di Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan, antara lain:

Hal. 24 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut tebal lurus hitam belah pinggir, tinggi + 170 Cm, alis biasa, mata biasa, hidung sedang, tidak berkacamata, kulit sawo matang, umur kira-kira sekitar 45 s.d 50 tahun.

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yang datang pada saat menandatangani minuta Akta Pengikatan Jual Beli adalah bukan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yang sebenarnya, saksi mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh penyidik, dan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. pernah cerita kepada saksi sekitar akhir Januari 2022, bahwa dirinya dipanggil ke Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait kasus tanah Jln. Tasikmalaya-Menteng, dan mengatakan kepada saksi bahwa ternyata ARIS SETYANTO NUGROHO yang datang pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 ternyata adalah figuran (palsu).
- Bahwa sebelum penandatanganan minuta semua pihak baik Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI memperlihatkan kepada Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. dokumen asli KTP, KK, Akta Nikah dan NPWP, kecuali Sdr. Ir. SANTOSO HALIM yang tidak menunjukkan.
- Bahwa yang memperlihatkan kepada Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn dokumen asli KTP, KK, Akta Nikah dan NPWP milik Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dan orang yang mengaku sebagai Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO adalah masing-masing pihak yang memiliki identitas tersebut, dengan kata lain Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dan orang yang mengaku sebagai Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO.
- Bahwa saksi lupa apa saja yang ditanyakan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. kepada Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dan orang yang mengaku sebagai Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO pada saat penandatanganan Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut.
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn tersebut digunakan oleh Ir. SANTOSO HALIM sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ir. SANTOSO HALIM dan PIETER NARDTY THENU mengetahui bahwa orang yang datang dan menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 adalah Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO palsu atau tidak.
- Bahwa saksi mengenali Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H, saksi tidak tahu

Hal. 25 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan dimana Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 tersebut ditandatangani, karena saksi tidak tahu prosesnya.

- Bahwa pada pokoknya Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 tersebut isinya adalah mencatat transaksi jual beli asset tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan SHM No: 1088/Menteng antara Ir. SANTOSO HALIM dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari penjual Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO sekaligus sebagai pembeli untuk diri sendiri dengan harga Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), Akta Jual Beli tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
- Bahwa Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H tersebut digunakan untuk salah satu persyaratan untuk proses balik nama SHM No. 1088/Menteng yang semua a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM di Kantor BPN Jakarta Pusat.
- Bahwa yang mengurus balik nama ke kantor BPN Jakarta Pusat adalah saksi berdasarkan permintaan tolong Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn kepada saksi untuk mengurus proses balik nama SHM No. 1088/Menteng tersebut menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa proses balik SHM No. 1088/Menteng tersebut berlangsung hanya dari tanggal 15 Juni 2016 masuk dokumen persyaratan selesai tanggal 16 Juni 2016.
- Bahwa untuk proses balik nama SHM No. 1088/Menteng biayanya ditanggung seluruhnya oleh Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa persyaratan yang saksi serahkan kepada pihak BPN Jakarta Pusat pada saat itu adalah antara lain : Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 juni 2016 yang diterbitkan oleh PPAT MESSIE PHOLUAN, Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, Asli Sertifikat Hak Atas Tanah, Hak Milik 09.01.03.03.1.01088, Fotokopi KTP pemohon, KK, NPWP dan Akta Nikah;
- Bahwa serah terima SHM No. 1088/Menteng setelah balik nama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2016 di kantor BPN Jakarta Pusat, saksi adalah orang yang menerima sertifikat tersebut, kemudian di hari yang sama saksi serahkan kepada Ir. SANTOSO HALIM melalui kurir kantor.

Saksi-4, HARI SETYAWAN, S.E., :

Hal. 26 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik FELIX SUTANDAR dan REKAN, menjabat sebagai *reviewer* atas pelaksanaan inspeksi, dengan tugas dan tanggung jawab adalah *mereview* atau mengoreksi hasil penilaian lapangan yang dilakukan oleh petugas penilai lapangan, saksi menjabat sebagai *reviewer* di KJPP FELIX SUTANDAR dan REKAN sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pihak yang memohon penilaian (*Appraisal*) atas objek berupa tanah dan rumah tinggal yang terletak di Jln.Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat adalah Ir. SANTOSO HALIM melalui Sdr. PIETER.
- Bahwa KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) melakukan pengecekan lapangan objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2016 yang melakukan adalah sdr. EKO SULISTIANTO;
- Bahwa dalam melaksanakan penilaian lapangan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat tersebut saksi EKO SULISTIANTO tidak didampingi oleh Ir. SANTOSO HALIM, akan tetapi saksi pernah bertanya kepada saksi EKO SULISTIANTO terkait siapa yang mendampinginya pada saat melaksaaan penilaian lapangan, EKO mengatakan bahwa dirinya melaksanakannya sendiri tanpa didampingi, hanya saja EKO bercerita kepada saksi bahwa ia mendapat telepon dari seseorang bernama Sdr. PIETER yang meminta EKO untuk datang ke objek penilaian untuk menemui Ibu ARIS yang merupakan istri dari pemilik rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan draf laporan hasil penilaian terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, yang dibuat dan disampaikan kepada saksi oleh saksi EKO SULISTIANTO untuk saksi koreksi, kemudian saksi melihat di salah satu kolom yang menerangkan bahwa rumah tersebut dihuni oleh “pemilik”, karena tugas saksi sebagai *reviewer* maka saksi meminta kepada saksi EKO SULISTIANTO untuk mengubah kata dihuni oleh “pemilik” diubah menjadi dihuni oleh Ir. SANTOSO HALIM dan keluarga, hal tersebut berdasarkan asumsi saksi, karena di SHM No: 1088/Menteng tertulis pemilik terakhir adalah Ir. SANTOSO HALIM sehingga saksi berpikir bahwa “pemilik” yang dimaksud oleh saksi EKO SULISTIANTO adalah Ir. SANTOSO HALIM dan keluarga, saksipun langsung memerintahkan saksi EKO SULISTIANTO untuk menuangkan hal tersebut ke dalam Laporan Penilaian.

Hal. 27 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya Ibu ARIS yang bertemu dengan saksi EKO SULISTIANTO pada saat inspeksi rumah di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat tersebut, saksi berpikir Ibu ARIS adalah nama dari istri dari pemilik rumah sesuai sertifikat yaitu Saksi SANTOSO HALIM.
- Bahwa setelah semua proses koreksi dan penandatanganan dilakukan, kemudian Laporan Penilaian No: FSR/SR-FS/06.0794/2016 tanggal 13 Juni 2016 tersebut diserahkan kepada Ir. SANTOSO HALIM, dan untuk keperluan dan digunakan untuk apa saja diserahkan kepada Ir. SANTOSO HALIM, akan tetapi sesuai proposal yang diajukan bahwa hasil penilaian akan digunakan oleh Ir. SANTOSO HALIM untuk persyaratan pinjaman/fasilitas kredit di Bank J-TRUST.

Saksi-5, MIFTAHUROJI, S.T :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASODJO dan REKAN yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 18 Jakarta Selatan, saksi menjabat sebagai tenaga penilai, dengan tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut adalah menganalisa dan memberi penilaian atas tanah dan bangunan yang akan menjadi agunan Perbankan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pihak yang memohon penilaian (Appraisal) atas objek berupa tanah dan rumah tinggal yang terletak di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat adalah PT. Bank UOB Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kerja dari PT. Bank UOB Indonesia Nomor: JKT/2019/07/2069 tanggal 24 Juli 2019.
- Bahwa pengecekan lapangan objek calon jaminan/agunan Bank UOB berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019 di lokasi alamat rumah tersebut.
- Bahwa dalam hal pendampingan dari pihak calon debitur (dalam hal ini adalah karyawan PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO yaitu PIETER THENU) dalam proses inspeksi lapangan atas calon objek jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat dilakukan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi atas objek penilaian seperti lokasi objek dan informasi pendukung lainnya

Hal. 28 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait objek penilaian, hal tersebut memang tidak diatur dalam aturan baku, tetapi dilakukan untuk lebih meyakinkan Penilai untuk melakukan penilaian.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan, saksi melakukan pengecekan berdasarkan data tetapi saksi melampirkan foto/dokumentasi yang dipergunakan adalah menggunakan dokumentasi yang sebelumnya pernah dilakukan pengecekan.
- Bahwa yang pertama kali melakukan pengecekan terhadap objek rumah yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat adalah Sdr. LIFDA, dan pada saat pengecekan yang pertama, yang menjadi pendamping lapangan adalah Sdr. PIETER.
- Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka kehadiran pendamping sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan inspeksi.
- Bahwa pihak yang membayar jasa penilaian kami adalah PT. Bank UOB Indonesia.
- Bahwa nilai objek calon jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tasikmalaya No.15 Menteng-Jakarta Pusat adalah Rp 60.274.330.000,- (enam puluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Saksi-6, MEISSIE PHOLUAN, S.H. :

- Bahwa saksi saat ini berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan wilayah kerja di Jakarta Pusat, kantor saksi beralamat di Jalan Tanah Abang I No. 9B RT 014 RW 08 Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn. sebagai sesama Notaris.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. R.R NURUL WURYANDANI, akan tetapi dengan Ir. SANTOSO HALIM saksi kenal karena pernah membuat AJB kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 antara Ir. SANTOSO HALIM q.q Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai Penjual beralamat di Jalan Pejompongan Raya No. 19 RT 011 RW 005 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Ir. SANTOSO HALIM sebagai pembeli beralamat di Jalan Pluit
Hal. 29 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai VIII/2 RT 007 RW 004 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dengan objek jual beli berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No: 1088/Menteng yang terletak di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat seluas 664 M2.

- Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2016 di Gedung Cyber I Lt. 2 Kuningan-Jakarta Selatan, yang merupakan kantor milik Ir. SANTOSO HALIM, yang dihadiri pada saat itu oleh Ir. SANTOSO HALIM, Notaris/PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn yang merupakan Notaris/PPAT di Kota Tangerang Selatan dan saksi, sedangkan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO tidak hadir.
- Bahwa Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 tersebut ditandatangani oleh Ir. SANTOSO HALIM q.q atau selaku kuasa dari Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, kemudian ditandatangani staf saksi dan saksi sendiri.
- Bahwa Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang saksi terbitkan tersebut digunakan untuk proses balik nama SHM No. 1088/Menteng/Jakarta Pusat dari Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa berdasarkan Salinan Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 antara Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dengan Ir. SANTOSO HALIM yang diserahkan Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn kepada saksi menjelaskan bahwa terdapat klausul dalam PJB tersebut yang menerangkan bahwa pihak pertama (ARIS SETYANTO NUGROHO) selaku penjual telah memberikan kuasa kepada pihak kedua (Ir. SANTOSO HALIM) untuk melepaskan, menjual, menghibah, menyewakan tanah dan bangunan SHM No. 1088/Menteng/Jakarta Pusat kepada orang lain atau dirinya sendiri (Ir. SANTOSO HALIM), serta pihak pertama (ARIS SETYANTO NUGROHO) memberikan kuasa kepada pihak kedua (Ir. SANTOSO HALIM) untuk menghadap, membuat akta, atau surat-surat lainnya dan menandatangani di hadapan PPAT (lihat Pasal 5).
- Bahwa kesimpulannya saksi menerbitkan Akta Jual Beli No. 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 tersebut atas permintaan Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, sehingga tidak diperlukan lagi kehadiran Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dalam penandatanganan AKB karena pada PJB terdapat klausul bahwa Sdr. ARIS

Hal. 30 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANTO NUGROHO telah memberi kuasa kepada Ir. SANTOSO HALIM untuk menjual tanah dan bangunan di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat baik kepada orang lain maupun kepada diri Ir. SANTOSO HALIM sendiri.

- Bahwa saksi menerbitkan Akta Jual Beli antara Ir. SANTOSO HALIM q.q Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dengan Ir. SANTOSO HALIM tersebut atas permintaan Notaris/PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn yang merupakan teman lama saksi, ia datang ke kantor saksi tanggal 12 Juni 2016 dengan membawa berkas-berkas persyaratan penerbitan AJB, diantaranya :
 - a. Asli Sertifikat Hak Milik No: 1088/Menteng;
 - b. Asli Salinan Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 antara Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dengan Ir. SANTOSO HALIM;
 - c. Photo copy KTP a.n. Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan istrinya R.R. NURUL WURYANDANI;
 - d. Photo copy buku nikah a.n. Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan istrinya R.R. NURUL WURYANDANI;
 - e. Photo copy Kartu Keluarga a.n. Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan istrinya R.R. NURUL WURYANDANI;
 - f. Photo copy NPWP a.n. Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan istrinya R.R. NURUL WURYANDANI;
 - g. SPPT-PBB tahun 2016 dengan NOP 31.73.020.001.012.0073.0 yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng Jakarta Pusat;
 - h. Photo copy KTP a.n. Ir. SANTOSO HALIM;
 - i. Photo copy Kartu Keluarga dan NPWP Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 antara Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dengan Sdr. Ir. SANTOSO HALIM yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi.

Saksi-7, ENDO KURNIADI :

Hal. 31 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RR. NURUL WURYANDANI, LUSI INDRIANI, ARIS SETYANTO NUGROHO dan Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa riwayat SHM No: 1088/Menteng berawal dari :
 - a. Surat Keputusan Ka Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 13 April 1994 Nomor: 1.711.2/164/09-01/27/B/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO seluas 664 M² yang terletak di Jalan Tasikmalaya No. 15 berdasarkan Surat Ukur tanggal 17 Januari 1994 Nomor: 34/1994;
 - b. Atas dasar SK tersebut diterbitkan HGB No: 3702/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO;
 - c. Kemudian berdasarkan Keputusan Ka Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor: 1.711.2/1034/09-01/024/M/1999 tanggal 23 Februari 1999 Hak Guna Bangunan Nomor: 3702/Menteng hapus dan selanjutnya diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak (SHM No: 1088/Menteng, Surat Ukur Nomor: 34/1994 seluas 664 M²), yang tercatat tanggal 11 Maret 1999;
 - d. Berdasarkan Akta Jual Beli No: 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H tanah tersebut beralih kepada Ir. SANTOSO HALIM yang tercatat pada tanggal 16 Juni 2016;
 - e. SHM No: 1088/Menteng dibebani Hak Tanggungan No: 2012/2016 peringkat I (pertama) atas nama PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, berdasarkan Akta PPAT VERONICA NATAADMADJA, S.H., MCorpAdmin., M. Com (Business Law) Nomor: 19/2016 tanggal 23 Juni 2016;
 - f. Kemudian dibebani Hak Tanggungan No: 1587/2018 peringkat II (kedua) atas nama PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, berdasarkan Akta PPAT VERONICA NATAADMADJA, S.H., MCorpAdmin., M. Com (Business Law) Nomor: 05/2018 tanggal 6 Juni 2018;
 - g. Setelah itu berdasarkan surat dari PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk tanggal 21 Juni 2019 Nomor: 153/JTRUST/ROYA-LBS/VI/2019, Hak Tanggungan Nomor: 2012/2016 peringkat I (pertama), Hak Tanggungan No: 1587/2018 peringkat II (kedua) hapus;

Hal. 32 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kemudian dibebani Hak Tanggungan Nomor: 1702/2019 peringkat I (pertama) atas nama PT. BANK UOB INDONESIA, berdasarkan Akta PPAT R. SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO, S.H., M.Kn, tanggal 25 Juli 2019 Nomor: 28/2019.

- Bahwa keberadaan dokumen asli SHM No. 1088/Menteng saat ini berada di Bank UOB dengan status jaminan kredit berdasarkan Hak Tanggungan Nomor: 1702/2019 peringkat I (pertama) atas nama PT. BANK UOB INDONESIA, berdasarkan Akta PPAT R. SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO, S.H., M.Kn, tanggal 25 Juli 2019 Nomor: 28/2019, dan sampai saat ini belum ada roya atas sertifikat tersebut.
- Bahwa pernah ada permohonan pemblokiran terhadap SHM No. 1088/Menteng, yaitu berdasarkan Surat dari Sdr. IMAM FIRDAUS tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Pemblokiran SHM No. 1088/Menteng atas nama Ir. SANTOSO HALIM, permohonan blokir tersebut tidak dapat kami laksanakan dan catatkan dikarenakan SHM No. 1088/Menteng masih menjadi Hak Tanggungan di PT. BANK JTRUST INDONESIA pada saat itu.
- Bahwa yang mengurus proses balik nama SHM No. 1088/Menteng yang semula atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM adalah seorang utusan dari Ir. SANTOSO HALIM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, kemudian berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah Nomor: 000863 terverifikasi tanggal 15 Juni 2016 yang menyetor pembayaran PPHTBnya adalah Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn diketahui oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.
- Bahwa BPN Jakarta Pusat tidak pernah menerbitkan SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi, karena SHM No. 1088/Menteng tercatat di BPN Jakarta Pusat telah beralih kepemilikan menjadi atas nama SANTOSO HALIM, dan terdapat beberapa perbedaan yang terlihat pada format tulisan SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi tersebut jika dibandingkan dengan SHM No. 1088/Menteng atas nama Ir. SANTOSO HALIM yang disimpan buku tanahnya oleh BPN Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan seksama perbedaan yang mencolok antara SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO yang diperlihatkan penyidik dengan SHM No. 1088/Menteng atas nama Ir.

Hal. 33 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO HALIM yang disimpan buku tanahnya oleh BPN Jakarta Pusat antara lain :

- a. Bentuk stempel pengecekan yang tertera pada SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO tidak sesuai dengan bentuk cap stempel yang ada pada Buku Tanah SHM No. 1088/Menteng;
 - b. Bentuk tandatangan Kepala Kantor BPN Jakpus pada kolom peningkatan Hak menjadi Hak Milik yang tertera pada SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO berbeda dengan tandatangan yang ada pada Buku Tanah SHM No. 1088/Menteng;
 - c. Bentuk tandatangan Ka Kantor BPN Jakarta Pusat Drs. RABUAT SARAGIH yang tertera pada SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO tidak sama dengan tandatangan yang ada pada Buku Tanah SHM No. 1088/Menteng;
 - d. Ketikan pada SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO terlihat seperti ketikan menggunakan komputer sedangkan pada Buku Tanah SHM No. 1088/Menteng ketikan menggunakan mesin ketik;
 - e. Bentuk tulisan tangan yang tertera pada SHM No. 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO terlihat berbeda dengan tulisan tangan yang ada pada Buku Tanah SHM No. 1088/Menteng.
- Bahwa aturan yang mengatur tentang mekanisme pelayanan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, administrasi yang harus dipenuhi untuk permohonan proses balik nama SHM adalah :
- a. Formulir Permohonan yang sudah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK dan Kuasa apabila dikuasakan);
 - d. Sertifikat asli;
 - e. Akta jual beli dari PPAT;

Hal. 34 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi KTP para pihak (penjual, pembeli dan/atau kuasanya);
- g. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan;
- h. Bukti SSB dan bukti bayar uang pemasukan saat pendaftaran.
- Bahwa dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, lamanya waktu balik nama SHM adalah 5 (lima) hari di atur dalam Pasal 8 Bab V perihal Waktu.
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas/pejabat pelayanan permohonan balik nama SHM adalah memeriksa kelengkapan dokumen. Setelah dokumen dinilai lengkap, dilakukan proses pencatatan pendaftaran peralihan haknya mulai dari penyiapan buku tanah, pengetikan pencatatan peralihan, pemeriksaan oleh petugas pelaksana, pemeriksaan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang menandatangani permohonan dimaksud. Kemudian setelah ditandatangani dilakukan penyerahan produk di loket penyerahan.
- Bahwa SHM No. 1088/Menteng dimohonkan untuk balik nama yang semula atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM diajukan 15 Juni 2016.
- Bahwa proses permohonan perubahan nama SHM No. 1088/Menteng dimohon oleh Sdr. HILDA KARMILA yang merupakan kuasa dari Ir. SANTOSO HALIM. Permohonan masuk pada tanggal 15 Juni 2016. Dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan meliputi :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Kuasa dari Ir. SANTOSO HALIM kepada Sdri. HILDA KARMILA;
 - c. Fotokopi KTP Ir. SANTOSO HALIM;
 - d. Fotokopi KTP ARIS SETYANTO NUGROHO;
 - e. Fotokopi KTP Rr. NURUL WURYANDANI;
 - f. Bukti pembayaran SPPT PBB tahun 2016;
 - g. Bukti Setoran BPHTB;
 - h. Bukti pembayaran penerimaan negara (PPH);
 - i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 di Notaris LUSI INDRIYANI, S.H. (notaris Kota Tangerang Selatan);

Hal. 35 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Akta Jual Beli Nomor 3/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat oleh PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H. (PPAT Jakarta Pusat).

- Bahwa dokumen permohonan beserta persyaratannya diterima oleh petugas loket Sdr. IBTAR IRIANSYAH pada tanggal 15 Juni 2016, yang kemudian diteruskan ke *back office* untuk di cek. Setelah dinilai lengkap diproses pencatatan peralihan untuk diketik oleh Sdr. IRIANTO HAMID, diperiksa dan dibukukan paraf oleh Kasubsi Sdr. PAULUS SUKAMTO, selanjutnya dilakukan paraf oleh Sdr. RIFAI NASUTON selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (tiap paraf tidak membubuhkan tanggal) kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor HUMAIDI, A.Ptnh., MM untuk ditandatangani. Kemudian SHM yang telah ditandatangani diserahkan kepada Sdri. HILDA KARMILA pada tanggal 16 Juni 2016 oleh Sdr. SLAMET RIFAI (petugas loket penyerahan).
- Bahwa proses balik nama SHM No. 1088/Menteng yang diselesaikan hanya dengan 1 (satu) hari tersebut tidak menyalahi aturan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan adalah maksimal 5 (lima) hari kerja, namun rata-rata waktu yang dibutuhkan di BPN Jakarta Pusat adalah 2 (dua) hari kerja. Waktu proses balik nama biasanya dipengaruhi oleh banyaknya permohonan dan sulit atau mudahnya menemukan dokumen warkahnya. Di BPN Jakarta Pusat, karena permohonan balik nama SHM tidak terlalu banyak, jika dokumen warkahnya tersedia dan mudah ditemukan, biasanya prosesnya cepat.
- Bahwa biaya yang wajib dikeluarkan oleh pemohon atau orang yang dikuasakan dalam mengurus balik nama SHM hanya biaya PNPB. SHM No. 1088/Menteng yang semula atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM, PNPB yang dibayarkan sejumlah Rp. 34.555.424,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Seandainya memang ada pembayaran di luar PNPB, menurut saksi adalah illegal.
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu siapa pejabat BPN Jakarta Pusat yang meminta sejumlah uang kepada Sdri. HILDA KARMILA untuk mempercepat proses balik nama SHM No. 1088/Menteng.
- Bahwa status SHM No. 1088/Menteng sampai dengan saat ini masih menjadi agunan kredit di PT. Bank UOB Indonesia atas nama PT. Media Akses Global Indo atas kredit senilai Rp. 76.441.112.782,- (tujuh puluh

Hal. 36 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Saksi-8, RITCHIE KELVIN LUMENTA :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT Bank JTRUST Indonesia Tbk (Bank JTRUST) yang beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 33, Jln. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa .
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. SANTOSO HALIM, karena ia merupakan Direktur di PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO (debitur Bank JTRUST).
- Bahwa Ir. SANTOSO HALIM mengajukan permohonan fasilitas kredit di Bank JTRUST sebesar Rp 50 Milyar dan memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No. 1088 atas nama Ir. SANTOSO HALIM yang berada di Jalan Tasikmalaya Menteng No. 15 - Jakarta Pusat.
- Status pinjaman PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO (Saksi Ir. SANTOSO HALIM) saat ini sudah lunas melalui mekanisme *take over* yang dilakukan oleh Bank UOB cabang Asemka.
- Bahwa oleh karena itu jaminan kredit berupa dokumen asli SHM No. 1088/Menteng atas nama Ir. SANTOSO HALIM telah diserahkan kepada Debitur yaitu PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO/Ir. Santoso Halim.

Saksi-9, JANE SUTEJA :

- Bahwa saksi bekerja di Bank UOB Cabang Asemka yang beralamat di Jalan Pintu Besar Selatan No. 59-65 Jakarta Barat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Santoso Halim, sebagai debitur Bank UOB cabang Asemka, yang asalnya dari *take over* dari Bank J-Trust, dengan memberikan jaminan berupa rumah yang ada di atas lahan SHM No: 1088/Menteng atas nama Ir. Santoso Halim.
- Bahwa untuk jatuh tempo Pinjaman Modal Kerja adalah tanggal 20 Mei 2021, sedangkan untuk Kredit Angsuran I (satu) jatuh temponya adalah tanggal 23 Mei 2021 dan Kredit Angsuran II (dua) tanggal 10 Juni 2021.

Saksi-10, ARIF BUDI PRASETIYO, S.E., M.M. :

Hal. 37 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng, sebagai Kasatpel Pendataan sejak Februari 2017, dengan tugas dan tanggung jawab secara umum mendata objek pajak daerah yang ada di Kec. Menteng-Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah / sengketa rumah yang terletak di Jl. Tasikmalaya no. 15 Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa penghuni rumah atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO mengajukan permohonan keringanan pajak PBB dan sampai saat ini ARIS SETYANTO NUGROHO masih tercatat sebagai wajib pajak atas objek pajak rumah yang terletak di Jl. Tasikmalaya no. 15 Menteng, Jakarta Pusat.

Saksi-11, ARIS SETYANTO NUGROHO :

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah Jl. Tasikmalaya no. 15 Menteng Jakarta Pusat, yang asalnya dari pemberian dari orang tua saksi, dan diterbitkan SHM nomor 1088/Menteng atas nama ARUS SETYANTO NUGROHO, dengan luas lahan 664 M2, luas bangunan 496m2.
- Bahwa saksi sebagai suami terdakwa RR. NURUL WURYANDANI, namun sekarang sudah cerai.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Notaris Lusi Indriani, Notaris Mesie Poluan, sdr. Ir. Santoso Halim maupun sdr. Pieter Nardy Thenu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat pada saat saksi mendapatkan keterangan dari pihak kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng tentang penolakan penghapusan PBB yang saksi ajukan, kemudian saksi mengutus Sdr. IMAM FIRDAUS untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke BPN Jakarta Pusat dengan cara mengajukan permohonan pemblokiran SHM No: 1088/Menteng dengan hasil permohonan blokir saksi ditolak berdasarkan Surat Kepala BPN Jakarta Pusat Nomor: 2380/8-31.71-300/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang menerangkan bahwa ternyata lahan dan rumah saksi sudah beralih nama menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM dan telah diagunkan oleh Ir. SANTOSO HALIM di Bank JTRUST INDONESIA.

Hal. 38 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk lebih jelas saksipun mengajukan permohonan penjelasan tentang lahan milik saksi tersebut kepada BPN Jakarta Pusat, hasilnya terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala BPN Jakarta Pusat Nomor: 285/VII/JP/2019 tanggal 19 Juli 2019 ternyata lahan dan rumah saksi sudah beralih nama menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM dan telah diagunkan oleh Ir. SANTOSO HALIM di Bank JTRUST INDONESIA.
- Bahwa hal itu semakin memperkuat keyakinan saksi bahwa telah terjadi hal yang tidak benar atas peristiwa beralihnya hak kepemilikan saksi atas lahan dan rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016, tandatangan yang ada pada Surat Perjanjian tersebut bukan tandatangan saksi.
- bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan awal permasalahan berpindahnya hak kepemilikan tanah dan bangunan saksi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, dan saksi meminta Sdr. IMAM FIRDAUS untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui proses peralihan kepemilikan SHM No. 1088/Menteng menjadi atas nama IR. Santoso Halim, tapi belakangan saksi akhirnya mengetahui setelah saksi membuat laporan polisi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Polisi saksi baru mengetahui bahwa pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 10 Juni 2016 ternyata di saat yang sama terjadi pula penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli (lunas) antara Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (figuran) dengan Ir. SANTOSO HALIM senilai Rp 15 Milyar dengan objek jual beli berupa tanah dan bangunan SHM No. 1088/Menteng di hadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, diketahui ternyata Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yang hadir dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli tersebut adalah figur yang dibawa oleh Sdr. MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO), dimana figur tersebut mengaku seolah-olah sebagai ARIS SETYANTO NUGROHO / suami dari sdr. NURUL WURYANDANI yang kemudian memalsukan tandatangan dan cap jari saksi.

Hal. 39 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 juga telah ditandatangani oleh figuran yang dibawa oleh Sdr. MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO) tersebut, mengaku-mengaku sebagai ARIS SETYANTO NUGROHO dengan cara memalsukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membawa dokumen asli SHM No. 1088/Menteng tersebut untuk ditunjukkan kepada MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI dan PIETER THENU, semua proses sampai dengan terbit Surat Perjanjian Kerjasama saksi tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 15 Milyar dari Ir. SANTOSO HALIM sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut, di kemudian hari saksi baru mengetahui atas pengakuan dari istri saksi (terdakwa RR. NURUL) bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp 15 Milyar dari Ir. SANTOSO HALIM, itupun tidak utuh, karena ada fee yang diberikan oleh istri Saksi kepada PIETER THENU sebesar Rp 2 Milyar.
- Bahwa saat ini bukti kepemilikan yang saksi miliki atas lahan dan rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat adalah Akta Jual Beli Nomor: 479/Menteng/1993 tanggal 23 April 1993 yang diterbitkan oleh Notaris MOENDJIATI SOEGITO, S.H sebagai PPAT di DKI Jakarta Raya.
- Bahwa saksi juga memiliki SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 atas nama saksi sendiri ARIS SETYANTO NUGROHO tetapi ternyata palsu.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi mendapatkan surat somasi dari pengacara AHMAD FAIZAL,SH. yang mengaku sebagai Kuasa Ir. SANTOSO HALIM yang isinya tentang mengingatkan kepada saksi untuk melakukan pembelian kembali lahan dan rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, jika tidak maka kepemilikan rumah akan beralih kepada Sdr. Ir. SANTOSO HALIM, kemudian saksi bertanya kepada isteri saksi (terdakwa RR.NURUL) dan ia mengakui bahwa ia punya hutang kepada Ir. SANTOSO HALIM, saksipun meminta kepadanya untuk dihubungkan dengan orang yang bisa menjelaskan permasalahan tersebut, lalu saksi disambungkan via telepon oleh isteri saksi (terdakwa RR.NURUL) dengan seseorang bernama CHANDRA No. HP 08111011609, saat itu saksi menanyakan berapa kewajiban istri saksi yang harus dibayar?, saat itu Sdr. CHANDRA mengatakan bahwa kewajiban yang harus dibayar Saksi adalah Rp 1 Milyar ditambah bunga menjadi Rp

Hal. 40 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,7 Milyar kalau tidak bayar maka hak membeli kembali saksi atas lahan dan rumah saksi akan hilang, maka demi kondusivitas keluarga, saksipun membayar hutang istri saksi tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek 5035180149 atas nama CHANDRA GUNAWAN dengan statement di voucher transfer adalah pembelian kembali aset bu Nurul dan Pak Aris Jln Tasikmalaya No. 15.

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran Rp 1,7 Milyar tersebut, pada tanggal 6 April 2018 saksi diajak oleh isteri saksi (RR.NURUL) ke kantor Notaris Drs. SOEBIANTORO, S.H yang beralamat di Jln. Cisanggiri IV No. 7 Kebayoran Baru-Jaksel, Saksi mengaku diminta oleh Sdr. CHANDRA GUNAWAN untuk mendatangi Notaris tersebut untuk mengambil dokumen asli SHM No. 1088/Menteng.
- Bahwa sesampainya di kantor Notaris tersebut saksi bertemu dengan staf Notaris yang saksi lupa namanya dan langsung terjadi serah terima dokumen dokumen asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 dan dibuatkan tanda terimanya, saksipun awalnya merasa permasalahan hutang istri saksi sudah selesai.
- Bahwa ternyata setelah saksi melakukan pengecekan di BPN Jakarta Pusat ternyata dokumen tersebut palsu, dan SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 yang asli telah beralih nama pemilik menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM dan telah diagunkan di Bank JTRUST INDONESIA.
- Bahwa yang menguasai fisik lahan dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat tersebut sampai dengan saat ini adalah saksi dan dokumen asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 yang diduga palsu tersebut masih ada pada saksi.
- Bahwa photocopy kwitansi tanggal 10 Juni 2016 yang isinya seolah-olah saksi telah menerima uang sebesar Rp 17 Milyar dari Ir. SANTOSO HALIM untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan tandatangan yang tertera di kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa isteri saksi (terdakwa RR.NURUL) tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang keinginannya berbisnis dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO) dan ia juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjadikan SHM No. 1088/Menteng sebagai jaminan hutang

Hal. 41 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. SANTOSO HALIM, saksi mengetahui urusan antara istrinya dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI dan Ir. SANTOSO HALIM setelah saksi mengetahui ada pengalihan hak rumah saksi di Menteng tersebut.

- Bahwa saksi terakhir kali memenuhi kewajiban membayar PBB atas lahan dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat tahun 2020 sebesar Rp 52.451.016,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu enam belas rupiah).
- Bahwa saksi mengenali Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn tersebut, akta tersebut merupakan pengikatan jual beli rumah saksi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng antara Ir. SANTOSO HALIM dengan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ARIS SETYANTO NUGROHO dan saksi tidak pernah hadir saat penandatanganan akta tersebut apalagi menandatangani. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn adalah akta yang saksi nyatakan palsu.
- Bahwa letak kepaluan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, yaitu :
 - a. Tanda tangan Saksi dan cap stempel jari saksi yang dipalsukan;
 - b. Nilai jual yang tertera pada akta tersebut adalah sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sementara yang diterima isteri saksi Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - c. Bunyi dari Pasal 2 pada akta tersebut mengandung kebohongan/keterangan palsu yaitu menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek jual beli tidak menjadi jaminan suatu hutang, faktanya bahwa pada saat akta tersebut ditandatangani, isteri saksi (terdakwa RR.NURUL) telah menjadikan SHM No. 1088/Menteng sebagai jaminan atas hutangnya kepada Ir. SANTOSO HALIM, hal tersebut jelas merugikan saksi karena akta tersebut jika dilihat dari tanggal penandatanganannya dibuat bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang menjadi perjanjian hutang piutang dengan jaminan antara isteri saksi

Hal. 42 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RR.NURUL) dengan Ir. SANTOSO HALIM yaitu tanggal 10 Juni 2016;

d. KTP dan Surat Nikah saksi yang menjadi lampiran pada akta tersebut juga telah dipalsukan.

e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 digunakan Ir. SANTOSO HALIM untuk menerbitkan Akta Jual Beli No. 3 tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H dan yang menjadi dasar terbitnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 tersebut adalah hutang piutang antara Saksi dengan Ir. SANTOSO HALIM.

- Bahwa saksi mengenali Akta Jual Beli No. 3 tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 3 tanggal 14 Juni 2016 tersebut, karena akta tersebut ditandatangani oleh Ir. SANTOSO HALIM sendiri sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, karena pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn tertera bahwa Ir. SANTOSO HALIM mendapat kuasa untuk menjual lahan dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat milik saksi.
- Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Akta Jual Beli No. 3 tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn yang palsu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. NURUL bahwa ia merasa dirinya telah dipermainkan/ditipu oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO), terdakwa NURUL telah dipengaruhi oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI untuk menjadikan SHM No. 1088/Menteng sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman dari Ir. SANTOSO HALIM dengan iming-iming proyek property yang tidak pernah ada.
- Bahwa atas peristiwa yang menimpa saksi, saksi mengaku mengalami kerugian sebesar ± Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) berdasarkan harga pasaran lahan dan bangunan SHM No. 1088/Menteng yang saksi ketahui saat ini.

Hal. 43 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12, IBTAR IRIANSYAH :

- Bahwa saksi adalah PNS pada BPN Jakarta Pusat, namun sejak Januari 2020 sudah pensiun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ARIS SETYANTO NUGROHO, R.R. NURUL WURYANDANI, PIETER NARDTY THENU, LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, HILDA KARMILA.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai staff loket peralihan hak BPN Jakarta Pusat pada saat itu adalah membuat dan menerbitkan SPS (Surat Perintah Setoran) biaya peralihan hak/jual beli tanah dan menerima permohonan peralihan hak sertifikat (menandatangani tanda terima) setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dinyatakan lengkap oleh petugas loket dan bertanggung jawab kepada Kasubsie Peralihan Hak.
- Bahwa setelah semua persyaratan permohonan peralihan hak atas SHM No. 1088/Menteng telah dipenuhi oleh pemohon, maka permohonan tersebut diproses di *back office* untuk diproses dan diperiksa oleh pejabat BPN Jakarta Pusat yang berwenang saat itu, setelah itu baru disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor, setelah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor barulah SHM No. 1088/Menteng tersebut dikembalikan aslinya oleh petugas pengeluaran sertifikat kepada pemohon dengan nama kepemilikan yang telah berubah.

Saksi-13, NURUL WURYANDANI :

- Bahwa Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO merupakan suami saksi, menikah sejak 17 Maret 1997, namun sekarang sudah cerai.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. SANTOSO HALIM, terdakwa pernah bertemu dengannya sekali saja di Gedung Cyber yang berada di Mampang-Jakarta Selatan pada sekitar bulan Juni 2016 dikenalkan oleh Sdr. PIETER THENU, saksi juga kenal dengan PIETER THENU, saksi pernah bertemu dengannya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali di Gedung Cyber, saksi dikenalkan dengan Sdr. PIETER THENU oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO).
- Bahwa pada tahun 2016 saksi diajak Kerjasama bisnis oleh LUTHFI, oleh karena itu saksi butuh modal.

Hal. 44 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat modal uang dari Ir. SANTOSO HALIM setelah saksi menjaminkan sertifikat rumah milik suami saksi yaitu SHM No: 1088/Menteng atas nama suami saksi Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yang terletak di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
- Bahwa sdr.LUTHFI merayu agar saksi menggunakan sertifikat rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat untuk dijadikan modal (dijaminkan) kepada orang kenalannya yang bisa memberikan pinjaman uang untuk modal bisnis property tersebut, saksi pun menerima masukan dari LUTHFI dan akan menggunakan sertifikat rumah suami saksi sebagai jaminan untuk mendapatkan modal.
- Bahwa lalu pada sekitar bulan Mei 2016 LUTHFI mengajak saksi ke Gedung Cyber di Mampang, nama perusahaan yang didatangi bernama "i-net", di lantai 1 (satu) saksi dipertemukan dan dikenalkan dengan seseorang bernama PIETER THENU, saat itu PIETER THENU mengatakan kepada saksi bahwa ia punya "big boss" bernama Ir. SANTOSO HALIM, ia juga mengatakan nanti Ir. SANTOSO HALIM yang akan memberikan uang kepada saksi berbentuk cek tunai.
- Bahwa PIETER THENU juga mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya Ir. SANTOSO HALIM untuk bertemu dengan saksi dan mengurus segala sesuatunya, saat itu saksi diminta oleh PIETER THENU untuk menunjukkan dokumen asli SHM No: 1088/Menteng, saksi pun menunjukkan SHM tersebut yang sebelumnya sudah saksi persiapkan, setelah melihat SHM tersebut PIETER THENU sempat memphotocopynya, lalu SHM No: 1088/Menteng yang asli dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa setelah itu saksi diminta PIETER THENU pulang untuk mempersiapkan dokumen berupa photo copy KTP saksi dan suami, photo copy Kartu Keluarga, photo copy buku nikah, photo copy NPWP saksi dan suami dan SHM No: 1088/Menteng yang asli, untuk nanti dibawa dan diserahkan ke Notaris pada tanggal 10 Juni 2016.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 saksi pergi menuju Gedung Cyber bertemu dengan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, PIETER THENU, dan Notaris bernama LUSI yang mengaku berkantor di Bintaro, saksi pun saat itu diminta oleh PIETER THENU untuk menyerahkan photo copy kartu keluarga, photo copy buku nikah, photo copy NPWP saksi dan suami serta SHM No: 1088/Menteng yang asli kepada Notaris LUSI, kemudian saksi menyerahkannya kepada Notaris tersebut, setelah itu saksi disodorkan

Hal. 45 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Surat Perjanjian Kerjasama untuk saksi tandatangani, sempat dibacakan oleh Notaris tapi saksi tidak terlalu perhatikan hanya mendengar sepintas saja, setelah saksi tandatangani saksi serahkan kembali kepada Notaris dan saksi menyaksikan PIETER THENU juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 antara Ir. SANTOSO HALIM dengan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO adalah Surat Perjanjian Kerjasama yang saksi tandatangani dihadapan Notaris di Gedung Cyber tanggal 10 Juni 2016 disaksikan oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI dan PIETER THENU.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat, kapan dan dimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut dibuat, setahu saksi, Notaris yang membawa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut.
- saksi mengaku tidak tahu kapan SHM No. 1088 tanggal 28 Oktober 1994 atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO berbalik nama menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa suami saksi / Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO tidak mengetahui bahwa saksi telah menjadikan SHM No: 1088/Menteng atas nama Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dijadikan jaminan pinjaman modal kepada Ir. SANTOSO HALIM, saksi melakukannya diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi.
- Bahwa saksi tidak diberikan salinan atau photo copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut, semua dokumen dipegang oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, akan tetapi akhirnya Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO memiliki dan menyimpan dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut.
- Bahwa suami saksi ARIS SETYANTO NUGROHO mendapatkan dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 tersebut dari MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI setelah saksi minta kepadanya.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut dikirim oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI melalui kurir JNE dikirim tanggal 16 Juli 2019, berikut photo copy asli SHM No. 1088/Menteng milik Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan asli tindasan kwitansi tanggal 10 Juni 2016 yang isinya seolah-olah Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO telah

Hal. 46 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp 17 Milyar dari Ir. SANTOSO HALIM untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.

- Bahwa suami saksi / ARIS SETYANTO NUGROHO dan Ir. SANTOSO HALIM tidak hadir pada pertemuan antara Saksi, MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI, PIETER THENU dan Notaris LUSI di Gedung Cyber tanggal 10 Juni 2016. ARIS SETYANTO NUGROHO juga tidak ikut menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tersebut, dan Ir. SANTOSO HALIM juga tidak hadir pada saat proses penandatanganan.
- Bahwa yang hadir dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 antara ARIS SETYANTO NUGROHO dan Ir. SANTOSO HALIM tersebut adalah seseorang bernama SIGI yang pada saat itu berperan seolah-olah menjadi suami saksi, SIGI (DPO) hadir dan memalsukan tandatangan ARIS SETYANTO NUGROHO pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, kemudian saksi ikut menandatangani sebagai pihak istri.
- Bahwa saksi mengaku tidak begitu kenal dengan SIGI, karena baru bertemu dengannya pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 saja.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menjadikan SIGI sebagai figur/berpura-pura sebagai ARIS SETYANTO NUGROHO pada penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 adalah MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, PIETER THENU dan Saksi Ir. SANTOSO HALIM mengetahui bahwa SIGI itu adalah figuran dan bukan ARIS SETYANTO NUGROHO yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengaku hadir pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, dan tandatangan yang ada pada Akta Pengikatan Jual Beli tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan pada tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan, dan yang hadir pada saat penandatanganan

Hal. 47 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli tersebut antara lain saksi sendiri, Sdr. PIETER THENU, Notaris Sdri. LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn dan stafnya, serta sdr. MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI dan SIGI.

- Bahwa yang meminta saksi datang ke Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli tersebut adalah Sdr. PIETER THENU yang merupakan staf dari Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO tidak hadir dan tidak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn tersebut. Yang menandatangani Akta tersebut dan berpura-pura sebagai ARIS SETYANTO NUGROHO adalah sdr. SIGI (DPO), selain memalsukan tandatangan ARIS SETYANTO NUGROHO sdr. SIGI juga membubuhkan cap jarinya pada minuta akta tersebut.
- Bahwa saat menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut saksi mengaku dalam keadaan sadar, terdakwa hanya mengikuti skenario yang dirancang oleh MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO) yang mengatur semuanya sehingga terbitlah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang merupakan salah satu proses peralihan hak atas tanah dan bangunan SHM : 1088/Menteng.
- Bahwa saksi mengaku tidak membaca Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut terlebih dahulu, pada saat itu Notaris LUSI INDRIANI, S.H., MKN sempat membacakannya sebelum Akta tersebut ditandatangani, akan tetapi saksi tidak memperhatikan dengan seksama.
- Bahwa yang memerintahkan sdr. SIGI (DPO) untuk menandatangani Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut adalah MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO), dan identitas yang ditunjukkan oleh Saksi SIGI kepada Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn berupa Asli KTP a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO dengan NIK 3171072402690007 yang tertera foto wajah dari Sdr. GIGI dengan alamat, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan yang sama dengan ARIS SETYANTO NUGROHO, ditambah Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/46/III/1997 tanggal 17 Maret 1997, yang tertera foto wajah dari SIGI dan saksi untuk meyakinkan Notaris bahwa dirinya adalah ARIS

Hal. 48 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANTO NUGROHO. Identitas tersebut sempat diperiksa oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.

- Bahwa awalnya pemahaman saksi terhadap Akta Pengikatan Jual Beli merupakan proses pengikatan saja agar tanah dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat yang saksi jaminkan kepada Ir. SANTOSO HALIM tidak lari kemana-mana, belakangan saksi baru mengetahui ternyata Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut menjadi dasar Ir. SANTOSO HALIM untuk menguasai tanah dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat milik ARIS SETYANTO NUGROHO.
- Bahwa Isi Pasal 1 (satu) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 tersebut adalah tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang pembayaran sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dari Sdr. Ir. SANTOSO HALIM sebelum penandatanganan Akta PJB, pembayaran saksi terima bertahap setelah Akta PJB tersebut ditandatangani, itupun bukan Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tapi Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Ir. SANTOSO HALIM baru melunasi pembayaran/menyerahkan uang kepada saksi tanggal 27 Juni 2016 dengan cara menyerahkan cek BCA No. BI967117.
- Bahwa yang mengetahui bahwa pembayaran Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tidak dibayar lunas melainkan menggunakan termin (bertahap) adalah PIETER NARDTY THENU, LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, Staff Notaris (perempuan Saksi tidak kenal), LUTFI dan SIGI. Pada saat terjadi penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 saksi mendengar Sdr. PIETER NARDTY THENU menjelaskan kepada Notaris dan forum disana bahwa pembayaran belum lunas, melainkan dengan cara bertahap.
- Bahwa sebelum terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 saksi bertemu dengan Sdr. PIETER NARDTY THENU sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pertemuan pertama sekitar bulan Mei 2016 di Gedung Cyber Mampang-Jakarta Selatan, saksi, ANGGA, temannya ANGGA bernama YANCE, LUTFI dan PIETER NARDTY THENU bertemu pertama kali, pada saat itu saksi menyampaikan keinginan saksi untuk meminjam uang, saksi tidak menyebutkan berapa nilai pinjaman yang saksi inginkan, lalu PIETER NARDTY THENU menanyakan jaminan apa yang saksi miliki, saksi katakan bahwa

Hal. 49 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan menjaminkan SHM No. 1088/Menteng, pada saat itu PIETER NARDTY THENU meminta fotokopi sertifikat tersebut, terdakwa memberikannya, kemudian saksi pulang.

Pada sekitar bulan Juni 2016, LUTFI menghubungi saksi dan mengatakan dirinya mendapat informasi dari PIETER NARDTY THENU bahwa nilai pinjaman yang disetujui adalah Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) namun proses pembayarannya dengan DP terlebih dahulu tidak bisa langsung, saksi pun menyetujui, lalu LUTFI meminta terdakwa datang kembali ke Gedung Cyber tanggal 9 Juni 2016 untuk menerima DP dari PIETER NARDTY THENU.

Setelah itu PIETER NARDTY THENU menghubungi saksi, mengatakan bahwa nilai pinjaman nanti akan ditulis Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), dengan alasan takut kena masalah pada pajak, lalu saksi mengiyakan.

b. Pertemuan kedua pada tanggal 9 Juni 2016 di Gedung Cyber, saksi, LUTFI dan PIETER NARDTY THENU bertemu, pada saat itu PIETER NARDTY THENU menyerahkan 2 (dua) lembar cek BCA kepada saksi sebagai DP pinjaman, masing-masing cek bernilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), PIETER NARDTY THENU menyampaikan nanti sisa pinjaman akan diserahkan setelah penandatanganan akad dilaksanakan, PIETER NARDTY THENU mengatakan bahwa ini pinjam meminjam tapi akad yang dilaksanakan adalah Pengikatan Jual Beli, dan apabila saksi tidak bisa membayar hutang tersebut maka rumah SHM No. 1088/Menteng harus dikosongkan, PIETER NARDTY THENU juga menyampaikan bahwa pembayaran bisa dicicil dan rumah tidak akan hilang karena akad yang dilaksanakan bukan Akta Jual Beli.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. PIETER NARDTY THENU dan Ir. SANTOSO HALIM maupun utusannya tidak pernah melakukan pengecekan langsung rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat baik sebelum maupun sesudah terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016.
- Bahwa sebelum terjadi penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Sdr. PIETER NARDTY THENU mengatakan kepada saksi bahwa ini pinjam meminjam tapi akad yang dilaksanakan adalah Pengikatan Jual Beli, pada **Hal. 50 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi tidak mengerti apa itu Pengikatan Jual Beli tapi PIETER NARDTY THENU menyampaikan bahwa pembayaran bisa dicicil dan rumah tidak akan hilang karena akad yang dilaksanakan bukan Akta Jual Beli, ditambah LUTFI (DPO) dan SIGI (DPO) mengatakan kepada saksi pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 bahwa Pengikatan Jual Beli adalah hutang piutang dan rumah tidak akan hilang.

- Bahwa sebelum peristiwa utang-piutang ini saksi pernah menyampaikan keluhan kesah kepada LUTFI tentang orang tua saksi yang sakit dan butuh biaya untuk berobat, serta adanya hutang yang melilit saksi dan orang tua terdakwa karena biaya berobat, saksi merasa tidak enak kalau harus melibatkan suami terus, lalu LUTFI mengatakan bahwa ada temannya yang bisa membantu untuk meminjamkan uang, saksi mengatakan kepada LUTFI bahwa saksi ada pegang sertifikat rumah milik suami saksi tapi suami saksi tidak tahu, lalu LUTFI mengatakan bahwa ia sanggup membantu menghadirkan orang yang bisa berpura-pura menjadi suami saksi untuk menghadap Notaris yaitu bernama SIGI, saksi pun menyetujui saran LUTFI tersebut.
- Bahwa setelah menyerahkan SHM No: 1088/Menteng tersebut kepada Notaris LUSI, saksi menerima uang sebesar Rp 15 Milyar dari Saksi Ir. SANTOSO HALIM, tapi itupun tidak utuh, karena ada potongan dilakukan PIETER THENU sebesar Rp 2 Milyar untuk dirinya, saksi tidak menanyakan untuk apa potongan tersebut saksi mengirim ke rekening rekening BCA atas nama PIETER NARDTY THENU dengan No. Rek 6250161954.
- Bahwa uang Rp 15 Milyar tersebut diberikan kepada saksi dengan beberapa tahapan menggunakan cek dan transfer dari Ir. Santoso Halim.
- Bahwa setelah mencairkan cek, saksi mendatangi Bank BCA yang berdekatan dengan Gedung Cyber di Kuningan, untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Sdr. PIETER THENU.
- Bahwa yang menguasai fisik lahan dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat tersebut sampai dengan saat ini adalah saksi dan suami saksi Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO.

Hal. 51 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencicil sebanyak 5 (lima) kali atas kewajibannya kepada Ir. SANTOSO HALIM, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mentransfer uang kepada PIETER NARDTY THENU antara 10-20 juta dengan jumlah total Rp.60.000.000,- dimana uang tersebut merupakan cicilan bunga hutang saksi kepada Ir. SANTOSO HALIM, seharusnya tiap bulan saksi harus membayar bunga Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Ir. SANTOSO HALIM, karena saksi tidak memiliki kemampuan membayar lagi, maka saksi bayar seadanya melalui PIETER NARDTY THENU dengan nilai sesuai permintaan dia.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi mendapatkan surat somasi dari Pengacara yang mengatasnamakan Ir. SANTOSO HALIM yang isinya mengingatkan agar saksi untuk melakukan pembelian kembali lahan dan rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, jika tidak maka kepemilikan rumah akan beralih kepada Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa akhirnya somasi tersebut diketahui oleh suami saksi dan ia menanyakan berapa kewajiban yang harus dibayar, dan ada kewajiban yang harus dibayar adalah Rp 1 Milyar ditambah bunga menjadi Rp 1,7 Milyar kalau tidak bayar maka hak membeli kembali saksi atas lahan dan rumah terdakwa akan hilang, maka suami saksi membayar sejumlah tersebut dengan *statement* di *voucher transfer* adalah “ *pembelian kembali aset bu Nurul dan Pak Aris Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng*”.
- Bahwa sebenarnya niat saksi mendatangi Ir. SANTOSO HALIM adalah ingin meminjam uang untuk modal usaha, biaya berobat orang tua dan membayar hutang-hutang orang tua, sehingga sejak awal saksi tidak tahu bahwa tanah milik Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng Jakarta Pusat akan dibalik nama kepada Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa saksi secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami saksi mengambil SHM atas nama suami saksi tersebut untuk dijadikan jaminan hutang tersebut.
- Bahwa saksi tidak memahami perbedaan PPJB dengan AJB, ataupun hutang piutang dengan jaminan dengan hak membeli Kembali.

Hal. 52 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan tetap berusaha membayar hutangnya kepada Ir. Santoso Halim sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar tersebut).

Saksi-14, LUSI INDRIANI,SH.,MKn. :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NURUL WURYANDANI, Sdr. SANTOSO HALIM, dan Sdr. PIETER NARDY THENU.
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bekerja sebagai Notaris sejak tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: C-38.HT.03.01-Th.2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang Pengangkatan Notaris sedangkan profesi PPAT dapatkan sejak tahun 2008 dengan dasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT.
- Bahwa Wilayah kerja saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah di Kota Tangerang Selatan, sedangkan wilayah kerja saksi sebagai Notaris adalah di Tangerang Selatan, akan tetapi Notaris dibolehkan membuat akta perikatan yang objeknya diluar wilayah kerja. Kantor saksi beralamat di Ruko Marcella III Jln. Pondok Betung Raya No. 9 Lt. 2 Bintaro Sektor 3A Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, PIETER THENU, Saksi R.R NURUL WURYANDANI adalah pihak yang hadir dalam terbitnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 atas objek tanah dan bangunan di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa Pengikatan Jual Beli yang saksi maksud adalah pengikatan yang saksi terbitkan yaitu Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016, yang merupakan PJB lunas sekaligus Kuasa Jual yang diberikan oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO kepada Ir. SANTOSO HALIM atas objek tanah SHM No: 1088/Menteng a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO, yang beralamat di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat. Dalam pengikatan jual beli tersebut sebagai penjual adalah ARIS SETYANTO NUGROHO dan pembeli adalah Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa penandatanganan Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2016 di Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan, yang merupakan kantor milik Ir. SANTOSO HALIM bernama i-net.
- Bahwa pada proses penandatanganan saat itu dihadiri oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (kemudian diketahui ternyata figuran), R. R. NURUL WURYANDANI, Ir. SANTOSO HALIM, PIETER THENU dan saksi sendiri sebagai Notaris.

Hal. 53 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 tersebut ditandatangani oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (figuran) sebagai Penjual, R. R. NURUL WURYANDANI sebagai istri dari Penjual dan Ir. SANTOSO HALIM sebagai Pembeli, dan sebagai saksi yang hadir dan ikut menyaksikan proses tersebut adalah Sdr. PIETER THENU.
- Berawal pada saat saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. PIETER THENU sekitar awal bulan Juni 2016, ia mengatakan bahwa Ir. SANTOSO HALIM berniat membeli aset SHM No: 1088/Menteng, saksi pun meminta data-data yang diperlukan kepada Sdr. PIETER THENU seperti photo copy KTP Penjual (suami istri), KK penjual, NPWP penjual dan Akta Nikah, serta biodata lengkap berupa dokumen identitas milik calon pembeli dan juga photo copy SHM No: 1088/Menteng.
- Setelah semua dokumen lengkap, saksi melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Pusat, ternyata semua aman, setelah itu saksi laporkan hal tersebut kepada Sdr. PIETER THENU, dan ia meminta agar akad dilakukan hari Jumat sore tanggal 10 Juni 2016 di kantor Ir. SANTOSO HALIM Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi tiba di kantor Ir. SANTOSO HALIM Gedung Cyber I Lt. 1 Kuningan-Jakarta Selatan, saksi menunggu sekitar 15 menit, kemudian datang bertemu dengan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (figure/palsu), R. R. NURUL WURYANDANI, Ir. SANTOSO HALIM dan PIETER THENU, lalu proses penandatanganan minuta PJB pun dilaksanakan, pada saat saksi membacakan isi akta para pihak mendengarkan dan hadir dihadapan saksi, setelah saksi selesai membacakan akta dan mengkonfirmasi terkait dokumen serta harga jual beli di hadapan para pihak, Ir. SANTOSO HALIM pamit meninggalkan ruangan sebentar, kemudian saksi mengajukan tandatangan minuta akta dan lembar sidik jari kepada pihak Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (figure/palsu) dan R. R. NURUL WURYANDANI, setelah selesai menandatangani minuta akta Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (figure/palsu) dan R. R. NURUL WURYANDANI keluar ruangan, lalu beberapa menit kemudian Ir. SANTOSO HALIM kembali ke ruangan dan menandatangani minuta akta, setelah saksi rasa lengkap saksi pulang.
- Pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 saksi mengaku tidak tahu bahwa Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yang datang menandatangani minuta Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan saksi adalah bukan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yang sebenarnya, akan tetapi setelah diberi tahu oleh penyidik pada saat

Hal. 54 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tahun 2019 saksi baru tahu bahwa yang datang ke hadapan saksi pada saat itu adalah Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO palsu.

- Sebelum penandatanganan minuta semua pihak baik Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, R. R. NURUL WURYANDANI maupun Ir. SANTOSO HALIM memperlihatkan kepada saksi dokumen asli, KTP, KK, Akta Nikah dan NPWP, yang ada fotonya hanya KTP dan Akta Nikah.
- Bahwa yang saksi tanyakan kepada R. R. NURUL WURYANDANI dan orang yang mengaku sebagai Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO pada saat penandatanganan Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016, adalah sesuai standar yang biasa saksi tanyakan kepada pihak-pihak yang ingin membuat akta, yaitu tentang identitas.
- Bahwa dari jawaban terdakwa R. R. NURUL WURYANDANI dan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO keduanya mengaku bernama sesuai KTP yang mereka serahkan kepada saksi, setelah saksi periksa foto yang ada pada KTP asli a.n. Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO terlihat sama wajahnya dengan orang yang datang kepada saksi mengaku sebagai ARIS SETYANTO NUGROHO, begitupula dengan Akta Nikahnya juga mirip wajahnya, dari situ saksi tidak menaruh curiga apapun, dan dari bahasa tubuhnya dan cara bicara mereka berdua terlihat memang layaknya seperti suami istri.
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang saksi terbitkan tersebut digunakan untuk proses balik nama SHM No. 1088/Menteng/Jakarta Pusat dari Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM, dimana setelah terbitnya PJB tersebut saksi menghubungi teman PPAT bernama Sdri. MESSIE PHOLUAN, S.H yang merupakan PPAT di Jakarta Pusat, untuk proses penerbitan Akta Jual Beli, Lalu beberapa hari kemudian terbitlah Akta Jual Beli Nomor: 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 oleh PPAT Sdri. MESSIE PHOLUAN, S.H antara Ir. SANTOSO HALIM selaku pembeli sekaligus selaku kuasa (q.q) dari ARIS SETYANTO NUGROHO selaku Penjual dengan Ir. SANTOSO HALIM selaku Pembeli.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ir. SANTOSO HALIM dan PIETER THENU mengetahui bahwa orang yang datang dan menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 adalah Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO palsu atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 antara Ir. SANTOSO HALIM dengan ARIS SETYANTO NUGROHO, karena selama ini saksi tidak pernah diberitahu tentang keberadaan surat tersebut. Surat perjanjian tersebut tidak pernah

Hal. 55 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar maupun lampiran dalam minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 10 Juni 2016.

- saksi menjelaskan bahwa menurut isi konteks Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 pada Pasal 1 (satu) adalah pengikatan jual beli dengan pembayaran lunas, saksi sempat menanyakan kepada para pihak apakah ini adalah pengikatan jual beli dengan pembayaran lunas? kemudian para pihak yaitu Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI, Ir. SANTOSO HALIM dan PIETER NARDTY THENU menjawab "iya lunas" dan mengkonfirmasi dengan menandatangani kwitansi dihadapan saksi oleh Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan R.R. NURUL WURYANDANI, namun pada saat itu saksi mendengar dari pihak pembeli bahwa ada termin-termin pembayaran, saksi menganggap hal tersebut merupakan kesepakatan internal mereka, dan saksi sebagai Notaris berpatokan pada kwitansi yang sudah ditandatangani oleh pihak penjual, serta isi Pasal 1 (satu) Akta Pengikatan Jual Beli yang menyatakan bahwa akta tersebut berlaku juga sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).
- Bahwa saksi tidak memasukkan kwitansi lunas tersebut ke dalam minuta akta karena belum saksi arsipkan. Setahu saksi kwitansi merupakan kelengkapan data transaksi jual beli, akan tetapi tidak wajib karena Akta Pengikatan Jual Beli itu sendiri merupakan bukti pembayaran yang sah (kwitansi).
- Alasan saksi tidak membuat Akta Pengikatan Jual Beli bertahap yang isinya mencantumkan termin-termin pembayaran adalah karena ada permintaan dari Ir. SANTOSO HALIM kepada Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan terdakwa R.R. NURUL WURYANDANI yang menginginkan dibuat Akta Pengikatan Jual Beli lunas.
- Pada saat itu saksi tidak menyarankan kepada para pihak kalau memang pembayaran akan dilakukan secara bertahap maka seharusnya dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli bertahap, akan tetapi karena ada permintaan dari Ir. SANTOSO HALIM kepada Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dan terdakwa Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI yang menginginkan dibuat Akta Pengikatan Jual Beli lunas.
- Isi konteks akta harus sesuai dengan fakta yang terjadi, apabila tidak sesuai fakta maka ada kesalahan terjadi, Akta Pengikatan Jual Beli yang saksi buat dalam perkara ini memang tidak sesuai dengan fakta, akan tetapi saksi buat semata-mata ada permintaan para pihak dan disetujui para pihak dengan menandatanganinya.

Hal. 56 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menuliskan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan karena sesuai dengan wilayah kerja saksi..
- Bahwa Sdri. RIKA CAHYA UMBARA dan Sdr. IRSAN MARADONA tidak hadir pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016, mereka menandatangani akta tersebut di kantor saksi di Tangerang Selatan, karena mereka merupakan staf saksi.
- Bahwa dasar saksi menuliskan pada Pasal 1 (satu) Akta Pengikatan Jual Beli bahwa uang sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) telah diterima Pihak Pertama dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani adalah pernyataan lisan para pihak.
- Pada saat itu saksi melihat ada kwitansi yang disodorkan oleh PIETER NARDTY THENU kepada figuran Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO untuk ditandatangani, saksi melihat Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO menandatangani, akan tetapi kwitansi tersebut tidak diserahkan dan tidak ditunjukkan kepada saksi, saksi hanya melihat saja setelah itu kwitansi tersebut disimpan oleh PIETER NARDTY THENU.
- Bahwa pada saat sebelum maupun sesudah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 saksi tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 antara Ir. SANTOSO HALIM dengan figuran ARIS SETYANTO NUGROHO.

Saksi-15, IR. SANTOSO HALIM :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan sdri. LUSI INDRIANI, sdri. RR.NURUL WURYANDANI maupun dengan sdr. PIETER NARDY THENU.
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa RR NURUL WURYANDANI pada sekira bulan Juni tahun 2016 dalam rangka saksi mendapat kabar dari PIETER NARDTY THENU bahwa akan ada yang menjual rumah yang terletak di Jalan Tasikmalaya No 15 ,Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh PIETER NARDTY THENU untuk melakukan survey terhadap rumah tersebut namun tidak bertemu penghuninya.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2016 bertempat di Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi bertemu dengan sdri. RR NURUL WURYANDANI dalam rangka penandatanganan Surat Perjanjian

Hal. 57 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama (SPK) antara saksi, terdakwa RR NURUL, sdr ARIS SETYANTO NUGROHO, disaksikan oleh PIETER NARDTY THENU ;

- Bahwa pada hari yang sama juga telah ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara saksi sebagai pembeli sedangkan sdr ARIS SETYANTO NUGROHO dan sdri. NURUL selaku penjual dihadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H.,M.Kn;
- Bahwa yang memilih notaris LUSI INDRIANI, S.H.,M.Kn adalah saksi ;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 10 Juni 2016 bertempat di Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan tersebut saksi, sdr ARIS SETYANTO NUGROHO, sdri. RR NURUL, sdr. PIETER NARDTY THENU, sdri. LUSI INDRIANI, S.H.,M.Kn, dan sdr. MAULVY PARAMA ARTHA Alias LUTHFI (DPO);
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn tersebut pada pokoknya berisi tentang jual beli antara ARIS SETYANTO NUGROHO yang diketahui oleh istrinya Sdri. R.R. NURUL WURYANDANI selaku penjual dengan saksi selaku pembeli, atas sebidang tanah dan rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat dengan SHM No. 1088/Menteng, dengan nilai jual beli adalah sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 tertulis bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa jual beli senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tunai, ditambah dengan pajak penjual yang harusnya dibayar oleh penjual dan komisi untuk pihak ketiga, diminta dibayarkan oleh pembeli, sehingga genap sejumlah Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah). Sehingga saksi hanya membayar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan cara pembayaran melalui 5 (lima) lembar cek tunai yang saksi serahkan kepada sdri.NURUL dan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO (yang kemudian diketahui hanya figuran).
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn saksi gunakan untuk ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli di hadapan PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H tanggal 14 Juni 2016;

Hal. 58 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Akta Jual Beli No: 3/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H, saksi adalah pihak dalam akta tersebut, para pihak dalam akta tersebut adalah saksi sebagai penjual (Pihak Pertama) selaku penerima kuasa dari ARIS SETYANTO NUGROHO, saksi juga bertindak sekaligus sebagai pembeli (Pihak Kedua) atas tanah dan bangunan SHM. No. 1088/Menteng yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat;
- Bahwa Akta Jual Beli No: 3/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan PPAT MESSIE PHOLUAN, S.H tersebut digunakan untuk balik nama kepemilikan tanah dan bangunan SHM No. 1088/Menteng di BPN, yang semula atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO menjadi atas nama IR. SANTOSO HALIM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. PIETER THENU sekitar Mei 2016, Sdri. NURUL membutuhkan pinjaman dana untuk modal usahanya dengan menjaminkan sebuah rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat dengan menunjukan fotokopi SHM No. 1088/Menteng, setelah beberapa kali dibicarakan oleh Sdr. PIETER THENU akhirnya saksi mengecek bersama Sdr. PIETER THENU kondisi dan keberadaan rumah tersebut, saksi hanya melihat sekeliling saja.
- Bahwa saksi tidak mau bermasalah dengan hutang piutang, dan PIETER THENU berkata kepada saksi bahwa akan ia sampaikan kepada Nurul;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Peter Thenu bahwa saksi hanya memiliki dana untuk dipinjamkan sejumlah Rp 15 Milyar, kalau NURUL mau silahkan tidak mau juga tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian sekitar awal Juni 2016, Sdr. PIETER THENU mengenalkan saksi dengan NURUL dan suaminya bernama ARIS SETYANTO NUGROHO, pada saat itu saksi sempat berdialog hanya sebatas perkenalan saja tidak lebih, NURUL pada saat itu tidak menjelaskan maksud dan tujuan dirinya datang menemui saksi, akan tetapi saksi sudah mendapat informasi dari Sdr. PIETER THENU bahwa maksud dan tujuan NURUL datang menemui saksi adalah untuk meminjam uang dengan menjaminkan SHM No. 1088/Menteng yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat, saat bertemu dengan NURUL saksi tidak menyampaikan sistem jual beli asset yang saksi inginkan, semua sudah saksi sampaikan kepada PIETER THENU, untuk selanjutnya diteruskan kepada NURUL;

Hal. 59 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi meminta kepada PIETER THENU menghubungi Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn untuk mengecek keabsahan dari SHM No. 1088/Menteng ke BPN dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kemudian Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn menjadwalkan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 dan saksi meminta kepada Notaris penandatanganannya dilakukan di kantor saksi Gedung Cyber Mampang Pratatan-Jakarta Selatan, dan Sdr. PIETER THENU yang mengundang NURUL dan suaminya untuk hadir pada penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 tersebut.;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 saksi lupa jamnya perkiraan menjelang siang Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn datang menemui PIETER THENU, pada saat PIETER THENU mengabarkan semua pihak sudah datang baru saksi turun ke lantai 1 Gedung Cyber untuk menemui mereka dan saksi melihat yang telah hadir adalah Sdr. PIETER THENU, Sdri. NURUL WURYANDANI, laki-laki yang mengaku ARIS SETYANTO NUGROHO dan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, pada saat itu Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn meminta saksi, Sdri. NURUL WURYANDANI dan ARIS SETYANTO untuk menunjukkan identitas asli seperti KTP, KK, Surat Nikah dan NPWP berikut menyerahkan fotokopinya, pada saat itu Notaris juga menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas, kemudian Notaris membacakan semua isi Akta Pengikatan Jual Beli dan menanyakan kepada pihak penjual ARIS SETYANTO NUGROHO (figuran) apakah sudah menerima pembayaran ? dan ARIS SETYANTO NUGROHO dan Sdri. NURUL WURYANDANI pun menjawab "iya sudah", kemudian Notaris mengatakan kalau begitu akta ini menjadi alat pembayaran yang sah, Notaris juga menunjukan SHM No. 1088/Menteng asli kepada saksi berikut hasil pengecekan ke BPN, setelah semua pertanyaan Notaris terjawab lalu Notaris menyodorkan Akta Pengikatan Jual Beli kepada ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai penjual atau pemilik asset, kemudian dilanjutkan tandatangan R.R NURUL WURYANDANI sebagai istri dan yang terakhir tandatangan adalah saksi sebagai pembeli.
- Bahwa setelah semua pihak tanda tangan, Notaris LUSI INDRIANI pamit pulang, kemudian di hari yang sama saksi menyerahkan beberapa cek tunai kepada NURUL dan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO yaitu :
 - a. Cek Tunai BCA No. BI967108 untuk tanggal pencairan 10 Juni 2016 senilai Rp 850 Juta atas nama Ir. SANTOSO HALIM;

Hal. 60 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cek Tunai BCA No. BI967109 untuk tanggal pencairan 10 Juni 2016 senilai Rp 150 Juta atas nama Ir. SANTOSO HALIM;
- c. Cek Tunai BCA No. BI967111 untuk tanggal pencairan 11 Juni 2016 senilai Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atas nama Ir. SANTOSO HALIM;
- d. Cek Tunai BCA No. BI967110 untuk tanggal pencairan 15 Juni 2016 senilai Rp 1 Milyar atas nama Ir. SANTOSO HALIM;
- e. Cek Tunai BCA No. BI967117 untuk tanggal pencairan 27 Juni 2016 senilai Rp 5 Milyar atas nama Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa selain pemberian cek saksi juga mentransfer uang ke rekening BCA a.n. R.R. NURUL WURYANDANI pada tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pihak terdakwa PIETER NARDTY THENU menyatakan keberatan sepanjang yang berkaitan dengan keterlibatan terdakwa dalam pemalsuan akta otentik/ Akta pengikatan Jual- beli dihadapan Notaris Lusi Indriani, karena terdakwa benar- benar tidak tahu jika ARIS SETYANTO NUGROHO adalah hanya figuran, dan terdakwa sudah menyampaikan kepada sdri . NURUL bahwa pihak Ir. Santoso Halim tidak biasa memberikan hutang, ia hanya maunya jual- beli dengan hak membeli kembali.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli-1, DR. ARIF WICAKSANA, S.H., M.H. :

- Bahwa Ahli sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pendidikan Terakhir Doktor Ilmu Hukum.
- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli telah membaca Surat Perjanjian Kerjasama antara RR. NURUL / ARIS SETYANTO dengan SANTOSO HALIM 10 Juni 2016, Ahli melihat adanya keterkaitan satu pasal dengan pasal lainnya yang menggambarkan adanya maksud untuk mengalihkan hak atas asset berupa tanah, tepatnya tanah di Jalan Tasikmalaya, No 15 Menteng Jakarta Pusat. Hal tersebut terlihat dari beberapa pasal yang antara lain isinya mengatur Pihak kedua bersedia menjual asset kepada pihak pertama, adanya opsi pembelian kembali seharga Rp 20.400.000.000,-,

Hal. 61 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut Ahli melihat ini merupakan sebuah perjanjian jual beli.

- Bahwa dari bunyi perjanjian Kerjasama tersebut terlihat bahwa R.R. NURUL WURYANDANI bermaksud untuk meminjam uang kepada Ir Santoso Halim dengan jaminan SHM No 1088/Menteng. Jadi dalam hal ini fakta yang terjadi adalah kehendak untuk melakukan pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah, akan tetapi ternyata PKS tersebut isinya adalah perjanjian jual beli.
- Bahwa oleh karena itu ada ketidaksesuaian antara fakta berdasarkan kronologi, judul perjanjian dan isi perjanjian, yaitu pinjam meminjam uang, tetapi judulnya Perjanjian Kerjasama, isi perjanjiannya adalah: jual beli rumah di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
- Bahwa dari SPK / Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terungkap R.R Nurul Wuryandani mendatangi Ir. Santoso Halim dalam rangka ingin meminjam uang dengan menjaminkan SHM No. 1088/Menteng, tetapi yang terjadi adalah membuat perjanjian jual beli, karena Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 adalah intinya adalah perjanjian jual beli.
- Bahwa dengan keadaan seperti ini, maka ada suatu hal kebohongan atau hal palsu yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut. Hal ini membuat perjanjian tersebut tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian Pasal 1320 butir ke 3 "suatu hal tertentu" dan syarat ini merupakan syarat obyektif dari sahnya perjanjian.
- Dengan demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum, yang akibatnya adalah dari semua memang tidak pernah terjadi Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan para pihak tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa namanya adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 10 Juni 2016, sehingga yang seharusnya terjadi adalah harga untuk jual beli. Jika nilai jual obyek adalah Rp 17.000.000.000, maka seharusnya yang diterima oleh R.R. Nurul adalah Rp 17.000.000.000 juga. Dengan kondisi seperti ini ada "hak yang tidak dibayar" kepada sdr R.R. Nurul sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Dengan adanya perbedaan antara Pasal 2 PJB dengan fakta, maka ada keterangan yang tidak benar yang dimasukkan ke dalam Akta Otentik, karena PPJB dimaksud dibuat dihadapan Notaris.

Hal. 62 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1868 KUHPdata: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan undang², dibuat oleh atau dihadapan pegawai² umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.
- Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 7, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan kedua ketentuan ini, maka akta notaris dapat dimasukkan kedalam kategori akta otentik.
- Bahwa dalam hal ini ada keterangan yang tidak benar dalam akta otentik yaitu AJB yang dibuat dihadapan PPAT. Akta yang dibuat di hadapan PPAT yaitu Akta Jual Beli No. 3 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadpan PPAT Meissie Pholuan, S.H juga merupakan akta otentik.

Ahli-2, Dr. IRWAN SANTOSA, S.H., Sp.N, M.Kn. :

- Bahwa Ahli mempunyai Pendidikan terakhir adalah S-3/Doktor Ilmu Hukum, , Pekerjaan Notaris-PPAT dan Dosen (S-2) Universitas Yarsi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah membaca Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 , dalam perjanjian tersebut banyak terdapat pelanggaran mulai dari antara judul dan isi perjanjian tidak sinkron, terdapat pemalsuan biodata pihak-pihak, terdapat jumlah pinjaman yang diperjanjikan dengan yang sebenarnya berbeda.
- Bahwa menurut Ahli mengenai Akta Pengikatan Jual-Beli (PJB) No. 5 tanggal 10 Juni 2016 antara NURUL/ARIS SETYANTO dengan SANTOSO HALIM yang dibuat oleh Notaris LUSI INDRIANI :Terdapat pelanggaran wilayah jabatan Notaris, Terdapat inkonsistensi antara judul dengan isi akta, Terdapat inkonsistensi nilai jual beli, Terdapat dugaan penyelundupan hukum dalam perjanjian, keinginan salah satu pihak adalah pinjam-meminjam namun dikemas dengan perjanjian jual beli,

Hal. 63 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pemalsuan biodata para pihak dan terdapat keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh para pihak.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas keterangan tidak benar yang ada pada Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn adalah : Pihak Pertama (ARIS SETYANTO NUGROHO palsu), Pihak Kedua (Ir. SANTOSO HALIM), PIETER NARDTY THENU, dan Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn, dikarenakan membiarkan terjadinya ketidakbenaran isi perjanjian yaitu perjanjian jual beli, karena faktanya Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn mengetahui bahwa perjanjian tersebut vbelum lunas akan tetapi dibuat lunas.

Menimbang, bahwa pihak terdakwa juga telah mengajukan Ahli yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*) bernama **RULI,SH.,MKn**, yang telah memberikan Pendapat dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Notaris dapat melakukan penandatanganan sesuai wilayah kerjanya.
- Bahwa Notaris boleh membuat Akta pengikatan Jual-beli diluar wilayah kerjanya.
- Bahwa harga transaksi sesuai kesepakatan, boleh dibawah NJOP.
- Notaris yang membuat Akta diluar wilayah kerjanya bukan suatu tindak pidana, melainkan hanya pelanggaran administrative, dan tidak ada sanksi pidana, maksimal hukumannya adalah berupa pemberhentian dari jabatan tidak dengan hormat.
- Bahwa dalam akta boleh dituliskan harga tidak sesuai riilnya yang dibayar , asal disepakati oleh para pihak, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar, karena pajak dihitung berdasarkan nilai transaksi.
- Bahwa pembeli yang beritikad baik,dan tidak mengetahui adanya kecacatan tersembunyi harus dilindungi hukum.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa PIETER NADTY THENU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. SANTOSO HALIM, sejak akhir tahun 2014, Ir. SANTOSO HALIM merupakan mitra kerja di tempat terdakwa bekerja, Ir. SANTOSO HALIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO.

Hal. 64 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengaku kenal dan pernah bertemu dengan Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI tahun 2016, terdakwa bisa mengenalnya karena Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dan suaminya Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO punya urusan pinjam meminjam uang dengan Ir. SANTOSO HALIM.
- Secara tertulis berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 yang meminjamkan uang adalah Sdr. Ir. SANTOSO HALIM dan yang meminjam adalah Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, nilainya pinjamannya adalah sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jaminan sebuah sertifikat rumah milik Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
- Yang menerima uang pinjaman dari Sdr. Ir. SANTOSO HALIM sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut adalah saksi R. R. NURUL WURYANDANI atas permintaan suaminya pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016, Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO mengatakan kepada terdakwa dan Notaris LUSI INDRIANI nanti uang Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut diserahkan saja kepada istrinya yaitu saksi RR.NURUL WURYANDANI.
- Atas permintaan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO tersebut Ir. SANTOSO HALIM menyerahkan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut kepada NURUL secara bertahap melalui cek tunai.
- Sampai dengan saat ini Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO belum melunasi hutang tersebut kepada Sdr. Ir. SANTOSO HALIM, akan tetapi Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO pernah menyicil beberapa kali melalui terdakwa, jumlahnya lupa.
- Bahwa terdakwa berkali-kali meminta kepada Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI agar dihubungkan dengan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, dengan maksud agar bisa menagih langsung kepada Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, akan tetapi selalu dihalangi oleh R. R. NURUL WURYANDANI dengan alasan suaminya sibuk dan tidak bisa diganggu.
- Bahwa hubungan pinjam-meminjam uang tersebut berawal sekitar bulan April atau Mei tahun 2016 terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa bernama ANGGA yang mengatakan bahwa ada orang yang mau bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menemui orang tersebut di Kafe Delima Lt. 1 Gedung Cyber I, pada saat itu yang menemui terdakwa ada 3 (tiga)

Hal. 65 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



orang yaitu sdr. ANGGA, kemudian orang mengaku bernama LUTFI dan R. R. NURUL WURYANDANI.

- Bahwa pada saat itu Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI cerita kepada terdakwa bahwa ia ada proyek properti di Surabaya dan Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI mengatakan bahwa LUTFI adalah Direktur perusahaannya yang juga ikut dalam proyek tersebut, dan untuk menjalankan proyek tersebut Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI mengatakan butuh dana untuk modal, dengan maksud mengajak terdakwa untuk bekerjasama atas proyek tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa menyatakan masih pikir-pikir dan belum mau ambil keputusan.
- Bahwa pada pertemuan kedua beberapa hari kemudian ANGGA, LUTFI dan Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI kembali mendatangi terdakwa di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama yaitu Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI ingin pinjam modal dan mengajak kerjasama bisnis, terdakwa pun menegaskan tidak mau ikut campur dalam proyek itu, tapi terdakwa mau bantu pinjamkan modal dengan syarat ada jaminan, pada saat itu R. R. NURUL WURYANDANI mengatakan bahwa ia memiliki rumah di Menteng yang akan ia jadikan jaminan, lalu terdakwa minta waktu untuk kroscek dokumen dan keadaan rumah secara riil di lapangan, kemudian Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI menyerahkan beberapa photo copy dokumen terkait identitas berupa KTP atasnama NURUL WURYANDANI dan suaminya, KK, Surat Nikah, NPWP, dan lain-lain, PBB asli serta photo copy dokumen alas hak rumah tersebut kepada staf terdakwa, untuk nantinya terdakwa pelajari.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengecekan baik dokumen maupun lokasi rumah tersebut dan setelah beberapa kali bertemu dengan LUTFI dan Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI selama beberapa bulan kemudian, baru terdakwa yakin, lalu melaporkan permohonan hutang tersebut kepada Ir. SANTOSO HALIM sebagai pemilik dana, pada saat itu Ir. SANTOSO HALIM meminta terdakwa untuk mengecek segala sesuatunya terlebih dahulu, mendengar permintaan tersebut terdakwa meminta kepada Sdr. ANGGA agar Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI membawa dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Asli miliknya yang objeknya berada di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat kepada Notaris LUSI INDRIANI dengan maksud untuk dilakukan pengecekan ke BPN Jakarta Pusat terlebih dahulu.

Hal. 66 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat informasi dari BPN Jakarta Pusat bahwa SHM No: 1088/Menteng tidak ada masalah, terdakwa meminta kepada Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI agar mempertemukan terdakwa dengan suaminya, tapi ia beralasan suaminya sedang sibuk dan berjanji akan mendatangkan suaminya pada saat akad perjanjian, pada saat itu terdakwa tentukan akad akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016 di Gedung Cyber I Lt. 1 Mampang Pratatan-Jakarta Selatan.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, datang ke Gedung Cyber I Lt. 1 Mampang Pratatan-Jakarta Selatan Sdr. LUTFI, Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dan seseorang yang mengaku suami dari Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI bernama ARIS SETYANTO NUGROHO, pada saat itulah terdakwa kenalkan Ir. SANTOSO HALIM kepada mereka, kemudian terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Pengikatan Jual Beli (lunas) dihadapan Notaris LUSI INDRIANI, dimana sebelumnya Notaris melakukan pengecekan dokumen dan membacakan isi dari PJB tersebut, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai pihak penjual disaksikan oleh R. R. NURUL WURYANDANI sebagai istri kemudian Ir. SANTOSO HALIM sebagai Pembeli dengan kesepakatan nilai jual sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa Penyerahan uang tersebut terdakwa serahkan kepada NURUL atas permintaan Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO dengan cara pemberian cek tunai.
- Bahwa mengenai Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 10 Juni 2016 tersebut, intinya membahas tentang termin pembayaran, opsi *buy back* dan proses penyelesaian hutang, seingat terdakwa pembayaran bunga bisa dilakukan dengan cara cicil perbulan dengan hutang pokok dibayar belakangan selama 2 (dua) tahun, tapi kalau dalam 1 (satu) tahun Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO bisa langsung melunasi tidak masalah, fleksibel saja.
- Bahwa mengenai isi PKS memang sudah ada konsepnya seperti itu, setiap ada orang yang ingin *bridging* (kerjasama pinjam uang) kepada Ir. SANTOSO HALIM dengan konsep beli kembali.
- Secara detail terdakwa tidak tahu isi dari Pengikatan Jual Beli Nomor: 05 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H tersebut, tapi intinya PJB tersebut merupakan PJB lunas yang artinya Sdr.

Hal. 67 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SETYANTO NUGROHO telah menjual tanah dan bangunan miliknya di Jalan Tasikmalaya No. 15 Menteng kepada Sdr. Ir. SANTOSO HALIM, dan PJB tersebut sekaligus menjadi bukti pembayarannya.

- terdakwa tidak ingat apakah Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 ditandatangani sebelum atau sesudah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 ditandatangani, yang jelas antara Surat Perjanjian Kerjasama dan Akta Pengikatan Jual Beli ditandatangani di hari dan tempat yang sama.
- terdakwa tidak tahu pengembangan usaha apa yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, seingat terdakwa sdri. NURUL pertama kali datang menemui terdakwa sekitar di bulan Mei 2016 dengan LUTFI dan ANGGA mengatakan kepada terdakwa ingin pinjam uang dengan menjadikan SHM No. 1088/Menteng sebagai jaminan, tapi terdakwa katakan bahwa konsepnya tidak pinjam meminjam, dan terdakwa mengatakan akan terdakwa bantu, saat itu terdakwa bertanya kepada Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI uangnya akan digunakan untuk apa, Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI menjawab bahwa uangnya akan digunakan untuk bisnis interior dengan LUTFI.
- Dalam pandangan terdakwa terdapat hubungan antara Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 dengan Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 karena ada opsi pembelian kembali pada Surat Perjanjian Kerjasama.
- terdakwa tidak memberitahukan kepada Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn terkait adanya Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016 karena bukan domainnya Notaris, Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah urusan ARIS SETYANTO NUGROHO, Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dengan Ir. SANTOSO HALIM.
- Bahwa yang menunjuk Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn sebagai Notaris yang membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 tersebut adalah Sdr. Ir. SANTOSO HALIM karena ia sudah kenal lama.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Ir. SANTOSO HALIM sudah melakukan pembayaran lunas senilai Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan pihak penjual telah menerima dengan tunai dan sempurna sebelum akta ini ditandatangani atau tidak.

Hal. 68 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. SANTOSO HALIM menghindari segala hal buruk yang bisa terjadi, kalau hanya mengandalkan Surat Perjanjian Kerjasama khawatir Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO ternyata tidak bisa bayar hutangnya maka Ir. SANTOSO HALIM tidak punya pegangan yang kuat, maka dibuatkan Pengikatan Jual Beli sebagai pegangan kuat SANTOSO HALIM, sehingga secara hukum Ir. SANTOSO HALIM adalah pemilik sah dari aset tersebut, akan tetapi kalau Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO ingin menebus aset tersebut sangat diperbolehkan oleh Ir. SANTOSO HALIM, karena tidak ada niat Ir. SANTOSO HALIM untuk mendapatkan rumah tersebut.
- Bahwa sebelum penandatanganan minuta semua pihak baik Sdr. ARIS SETYANTO NUGROHO, terdakwa maupun Sdr. Ir. SANTOSO HALIM memperlihatkan kepada Notaris LUSI INDRIANI dokumen asli, KTP, KK, Akta Nikah dan NPWP.
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 di Gedung Cyber I Lt. 1 Mampang Prapatan-Jakarta Selatan, laki-laki tersebut sendiri mengaku bernama ARIS SETYANTO NUGROHO yang merupakan suami dari R. R. NURUL WURYANDANI, kalau permasalahannya seperti ini terdakwa mengira yang lebih tahu adalah Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI dan Sdr. LUTFI, karena setiap kali terdakwa bertemu dengan Sdri. R. R. NURUL WURYANDANI selalu didampingi oleh Sdr. LUTFI bahkan sampai dengan hari penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dan Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Juni 2016 Sdr. LUTFI masih ikut mendampingi.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu jika ARIS SETYANTO NUGROHO yang mengaku sebagai suami terdakwa NURUL dan menandatangani Akta pengikatan Jual beli dihadapan Notaris Lusi Indriani adalah hanya orang figuran.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan dipersidangan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016.
2. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat senilai Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).
3. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: Set.021/YS/UM/01/2016 tanggal 19 Januari 2016;
4. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana tanggal 15 Nopember 2018 perihal Ucapan Terimakasih;

Hal. 69 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana Nomor: 01/294/V/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Dispensasi Mahasiswa Pada Acara Syuting MetroTV "Hari Pendidikan Nasional".
6. Asli Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 29 Juni 2020;
7. Asli SPPT-PBB a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO NOP: 31.73.020.001.012-0073.0 tanggal 16 April 2020;
8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: HP.03.03/1108-31.71/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Informasi Atau Status Bidang Tanah;
9. Asli Tindakan Slip Setoran Bank BCA tanggal 14 Maret 2018 dari No. Rek 2211272980 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI ke No. Rek 5035180149 a.n. CAHNDRA GUNAWAN senilai Rp. 1.721.968.250,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
10. Asli Paspor Republik Indonesia No. A6804057 tanggal 7 November 2013 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.
11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli No: 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No: 05 tanggal 10 Juni 2016 diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3173042805780009 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3172012809110049 a.n. Kepala Keluarga Ir. SANTOSO HALIM.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 07.653.213.4-033.000 a.n. SANTOSO HALIM.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Tambahan Sidik Jari (Para) Penghadap a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171072402690007 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171075502730003 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI, NPWP No. 73.654.642.5-077.000 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dan NPWP No. 06.699.380.9-077.000 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.

Hal. 70 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 13 Januari 2011 a.n. Kepala Keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 21.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Nikah No. 717/46/III/1997 tanggal 17 Maret 1997.
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT a.n. Wajib Pajak ARIS SETYANTO NUGROHO tanggal 11 Januari 2016 dengan NOP 31.73.020.001.012.0073.0.
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran Pajak Penjual tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 44.329.140.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran BPHTB tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 846.000.000.
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (Modal Kerja dan Investasi) Bank UOB tanggal 22 April 2019.
- 27.1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
- 28.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2019 tanggal 25 Juli 2019 diterbitkan oleh PPAT R. SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO, S.H., M.Kn.
- 29.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 1702/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
- 30.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Kredit Nomor: 69 tanggal 17 November 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 31.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor: 54 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 32.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 30 tanggal 7 April 2017 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 33.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 59 tanggal 13 April 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 34.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 73 tanggal 17 Mei 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.

Hal. 71 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 19 tanggal 19 Juni 2019 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M berikut fotocopy legalisir lampiran Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia.
- 36.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 16 tanggal 23 Desember 2020 diterbitkan oleh Notaris NGESTIRINI BASOEKI, S.H.
- 37.1 (satu) eksemplar asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. Ir. SANTOSO HALIM seluas 664 M2 berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
- 38.1 (satu) bendel fotokopi legalisir minuta akta dan salinan akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
- 39.1 (satu) lembar fotokopi legalisir lembar tambahan sidik jari (para) panghadap Nomor Akta 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn
- 40.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. SANTOSO HALIM, NIK: 3173042805780009.
- 41.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3172012809110049 an kepala keluarga IR. SANTOSO HALIM.
- 42.1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta perkawinan No. AK.5000294716 an. SANTOSO HALIM dengan FITRIAGUSTIN TJANDRA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Prov. DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2009.
- 43.1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP nomor: 07.653.213.4-033.000 an. SANTOSO HALIM.
- 44.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. ARIS SETYANTO NUGROHO, NIK: 3171072402690007.
- 45.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. RR. NURUL WURYANDANI NIK: 3171075902730003 NPWP nomor: 73.654.642.5-077.000 an. RR. NURUL WURYANDANI, NPWP nomor: 06.699.380.9-077.000 an. ARISSETYANTO NUGROHO.
- 46.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Nikah dengan nomor: 717/46/III/1997 an. IR ARISSETYANTO NUGROHO dengan RR. NURUL WURYANDANI, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung tanggal 17 Maret 1997.
- 47.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3171072401090484 an. kepala keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.

Hal. 72 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO Nomor: SK.MAGI-FIN/16/023 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO.
- 49.1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 029/SPK/Jtrust/BDM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ditujukan kepada PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO perihal Surat Penegasan Kredit (SPK).
- 50.1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 40 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
- 51.1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 41 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com;
- 52.1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 42 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
- 53.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penawaran Kredit Nomor: 104/SPK/JTRUST/CBD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
- 54.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1034/CA/III/17/006 tanggal 20 Maret 2017.
- 55.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 22 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
- 56.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
- 57.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 073/Jtrust/CSME/JKT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Surat Keterangan Lunas.
- 58.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 153/Jtrust/Roya-LBS/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan.
- 59.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penilaian No: FSR/SR-FS/06.0794/2016 tanggal 13 Juni 2016 oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan terhadap rumah tinggal di Jl. Tasikmalaya No.15, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat a.n. SANTOSO HALIM.
- 60.1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat dari KJPP Felix Sutandar & Rekan Ref No: 080/FSR/Spn-Wn/0306 tanggal 03 Juni 2016 perihal lingkup penugasan dan proposal jasa penilaian asset.

Hal. 73 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 atas nama Ir. SANTOSO HALIM.

62. Print out rekening koran rekening BNI a.n. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 0394357881.

63.1 (satu) bundel print out rekening koran rekening BCA a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 8780919273.

64. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 003/SOM/MS-ASN/IV/18 tanggal 12 April 2018 perihal Surat Somasi.

65. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 005/SOM/MS-ASN/V/18 tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Somasi II.

66. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 035/SOM/MS-ASN/VII/19 tanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Pengosongan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut para saksi maupun terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- a. Kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau,
- b. Kedua ,pasal 263 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alterantif Kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.
- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah ketererangannya itu cocok dengan hal sebenarnya.
- Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa PIETER NARDTY THENU yang identitasnya

Hal. 74 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu*", maksud dari Akta otentik artinya suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa RR. NURUL WURYANDANI bersama-sama dengan LUTHFI (DPO) dan sdr. SIGI (DPO) pada tanggal 10 Juni 2016, bertempat di Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan telah bertemu dengan Notaris Lusi Indriani, SH.,MKn., untuk membuat Akta Pengikatan Jual-Beli atas tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM nomor 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO, dimana sdri. NURUL telah memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan notaris itu, berupa keterangan mengenai suami NURUL bernama ARIS SETYANTO NUGROHO yang diperankan oleh orang lain yang bukan suami yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada mulanya pada sekitar awal tahun 2016 RR. NURUL WURYANDANI membutuhkan dana untuk keperluan kerjasama pembangunan apartemen di Surabaya dengan sdr. MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI (DPO).
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut kemudian MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI merayu RR. NURUL WURYANDANI agar menggunakan sertifikat rumah RR. NURUL WURYANDANI di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat untuk dijadikan modal (dijamin).
- Bahwa kemudian timbul niat RR. NURUL WURYANDANI untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 1088/Menteng atas nama suaminya ARIS SETYANTO NUGROHO secara diam-diam tanpa ijin suaminya tersebut.
- Kemudian sekira bulan Mei 2016, MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTHFI mengajak RR. NURUL WURYANDANI menuju ke Gedung Cyber I Mampang Prapatan Jakarta Selatan, kemudian RR. NURUL WURYANDANI dikenalkan dengan terdakwa PIETER NARDTY THENU, pada saat itu RR. NURUL WURYANDANI menyampaikan maksud kedatangannya adalah ingin meminjam uang, lalu

Hal. 75 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIETER NARDTY THENU menyanggupi akan membantu dengan mengatakan kepada RR. NURUL WURYANDANI bahwa ia punya "big boss" yakni Ir. SANTOSO HALIM, kemudian PIETER THENU juga mengatakan nanti Ir. SANTOSO HALIM yang akan memberikan uang kepada RR. NURUL WURYANDANI dalam bentuk cek tunai, namun untuk itu harus ada jaminan.

- Kemudian setelah sertifikat SHM No. 1088/Menteng a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO (saksi korban) diambil oleh RR. NURUL WURYANDANI, selanjutnya dibawa dan ditunjukkan kepada terdakwa PIETER NARDTY THENU dan oleh PIETER NARDTY THENU sertifikat tersebut di fotocopy untuk di tunjukkan kepada Ir SANTOSO HALIM.
- Selanjutnya masih sekitar bulan Juni 2016, RR. NURUL WURYANDANI dan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTFI kembali mendatangi Gedung Cyber untuk bertemu lagi dengan terdakwa PIETER NARDTY THENU, dimana pada saat itu PIETER NARDTY THENU menyampaikan bahwa Ir SANTOSO HALIM bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan sistem pengembalian / buyback dengan jangka waktu dan nanti akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris, atas perkataan terdakwa Pieter Nardty Thenu tersebut kemudian RR. NURUL WURYANDANI menyetujuinya, lalu PIETER NARDTY THENU meminta agar RR. NURUL WURYANDANI datang kembali ke Gedung Cyber dengan membawa serta suaminya ARIS SETYANTO NUGROHO yaitu sebagai pemilik asset dan nama yang tertera dalam dokumen SHM No. 1088/Menteng, dan membawa semua dokumen-dokumen asli pendukung berikut fotokopinya yaitu SHM No. 1088/Menteng, KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, dan lain-lain.
- Oleh karena RR. NURUL WURYANDANI tidak meminta ijin kepada saksi ARIS SETYANTO NUGROHO untuk menjadikan SHM tersebut sebagai jaminan, maka timbullah niat RR. NURUL WURYANDANI dan MAULVY PARAMA ARTHA Als LUTFI (DPO) untuk mencari pemeran pengganti/ figuran untuk berpura-pura sebagai suami RR. NURUL WURYANDANI yaitu saksi ARIS SETYANTO NUGROHO di hadapan Notaris, agar pinjaman tersebut dapat diberikan kepada RR. NURUL WURYANDANI.
- Bahwa RR. NURUL WURYANDANI yang seharusnya membawa suaminya yaitu ARIS SETYANTO NUGROHO ternyata membawa orang lain untuk berpura-pura menjadi ARIS SETYANTO NUGROHO sebagai pemilik setifikat yang sebenarnya dengan peran pengganti yaitu sdr SIGI (DPO), dimana selanjutnya sdr. SIGI tersebut bersama RR. NURUL WURYANDANI menghadap notaris yaitu saksi Lusi Indriani,SH.Mkn. untuk dibuatkan Akta pengikatan Jual-beli atas objek berupa

Hal. 76 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah / bangunan jl. Tasikmalaya nomor 15 Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam SHM nomor 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO.

- Bahwa RR. NURUL WURYANDANI juga telah melengkapi dengan identitas palsu suaminya tersebut dengan menyerahkan kepada Notaris surat-surat berupa KTP atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO yang fotonya telah diganti dengan foto sdr. SIGI, dan surat Nikah terdakwa dengan ARIS SETYANTO NUGROHO yang fotonya juga telah diganti dengan foto sdr. SIGI .
- Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual-beli yang dibuat dihadapan Notaris yaitu saksi Lusi Indriani SH.,MKn. Tersebut semua dokumen-dokumen yang digunakan dalam Akte itu menggunakan data-data ARIS SETYANTO NUGROHO namun wajah foto yang digunakan adalah wajah saudara SIGI (DPO) .
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 , bertempat di Gedung Cyber-1 Mampang, Jakarta Selatan , telah dibuat Akta Pengikatan Jual- Beli dihadapan Notaris Lusi Indriani,SH.Mkn. atas objek berupa tanah / bangunan jl. Tasikmalaya nomor 15 Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam SHM nomor 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO, dimana yang menandatangani, membubuhkan cap tiga jari dan foto dalam Minuta Akta tersebut adalah ARIS SETYANTO NUGROHO palsu/ figuran yang diperankan oleh sdr. SIGI (DPO).
- Bahwa Akta Pengikatan Jual-beli tersebut mempunyai nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Lusi Indriani,SH.Mkn.Notaris di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menyuruh saksi NURUL WURYANDANI untuk membuat perjanjian pengikatan jual- beli dihadapan notaris LUSI INDRIANI,SH.,MKn., padahal awal mulanya saksi NURUL WURYANDANI keinginannya adalah hanya hutang / pinjam uang dengan memberikan jaminan pelunasannya berupa tanah/ dan bangunan SHM nomor 1088/Menteng atas nama ARIS SETYANTO NUGROHO, bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut kemudian saksi NURUL WURYANDANI membuat pernyataan palsu berupa pernyataan pengikatan jual- beli , (padahal seharusnya hanya memberikan jaminan hutang) dihadapan notaris LUSI INDRIANI,SH,MKn. yang kemudian dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual-beli nomor 5 tanggal 1 Juni 2016.

Menimbang, bahwa dengan demikian “*menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu*”, telah terpenuhi.

Hal. 77 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur : *“Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah ketererangannya itu cocok dengan hal sebenarnya”*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah ada Akta Pengikatan Jual-Beli nomor Nomor: 5 tanggal 10 Juni 2016 yang isinya tidak benar tersebut maka Ir. SANTOSO HALIM meminta kepada saksi Notaris Lusi Indriani,SH.Mkn. untuk ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli selanjutnya atas permintaan tersebut, saksi Notaris Lusi Indriani,SH.Mkn menghubungi Notaris MESSIE PHOLUAN, S.H. untuk dibuatkan akta jual beli atas objek tanah SHM 1088/Menteng milik ARIS SETYANTO NUGROHO tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Notaris Lusi Indriani,SH.Mkn menyuruh stafnya bernama HILDA KARMILA untuk mengurus balik nama ke Kantor BPN Jakarta Pusat terhadap SHM Nomor 1088/Menteng dari semula atas nama Aris Setyanto Nugroho menjadi tas nama Ir. SANTOSO HALIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Akta PJB nomor 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh saksi Notaris Lusi Indriani,SH.Mkn tersebut, maka telah digunakan oleh saksi Ir. Santoso Halim untuk melanjutkannya dengan Akta Jual-Beli dihadapan Notaris yaitu saksi Messie Pholuan, dan selanjutnya dengan adanya Akta Jual-beli tersebut telah digunakan untuk mengajukan permohonan balik-nama atas SHM Nomor 1088/Menteng dari semula atas nama Aris Setyanto Nugroho menjadi atas nama Ir. SANTOSO HALIM .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah ketererangannya itu cocok dengan hal sebenarnya*”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur : *Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, maksud dari unsur ini adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan “kerugian” disini bukan saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan,dll. Sudah dianggap sebagai “*mempergunakan*” ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan, dan harus pula bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Hal. 78 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURUL WURYANDANI yang *menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik* (yaitu Akta pengikatan Jual- Beli nomor 5 tanggal 10 Juni 2016) telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban sdr. Aris Setyanto Nugroho, yang mengalami kerugian karena harta miliknya berupa tanah/bangunan yang terletak di Jl.Tasikmalaya nomor 15 Menteng Jakarta Pusat telah beralih nama menjadi nama orang lain, sehingga menurut keterangan saksi korban yang mendasarkan pada perkiraan harga tanah/ bangunan di lokasi tersebut kerugian yang dideritanya adalah sekitar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur : *mereka yang melakukan , menyuruh melakukan, turut serta melakukan* .Maksud dari unsur ini adalah pelaku dari tindak pidananya adalah lebih dari satu orang, dimana diantara para pelaku tersebut ada Kerjasama yang erat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti , telah terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah ketererangannya itu cocok dengan hal sebenarnya* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik (yaitu Akta pengikatan Jual- Beli nomor 5 tanggal 10 Juni 2016) terdapat kerjasama yang erat antara saksi NURUL WURYANDANI dengan terdakwa, Kerjasama tersebut wujudnya adalah berupa menyuruh saksi NURUL untuk menyatakan dalam akta otentik bahwa NURUL melakukan perjanjian pengikatan jual-beli , padahal seharusnya yang dikemukakan saksi Nurul dalam Akta adalah memberikan jaminan pelunasan atas hutangnya saksi NURUL kepada saksi SANTOSO HALIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka dengan demikian unsur *mereka yang melakukan , menyuruh melakukan, turut serta melakukan* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 266 ayat (1) KUHP jo .pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan

Hal. 79 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian isi pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan, tidak beralasan hukum, sehingga seluruh isi nota pembelaan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penahanan RUTAN maupun Tahanan Kota yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016.
2. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
3. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: Set.021/YS/UM/ 01/2016 tanggal 19 Januari 2016;
4. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana tanggal 15 Nopember 2018 perihal Ucapan Terimakasih;
5. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana Nomor: 01/294/V/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Dispensasi Mahasiswa Pada Acara Syuting MetroTV "Hari Pendidikan Nasional".
6. Asli Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 29 Juni 2020;
7. Asli SPPT-PBB a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO NOP: 31.73.020.001.012-0073.0 tanggal 16 April 2020;
8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: HP.03.03/1108-31.71/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Informasi Atau Status Bidang Tanah;
9. Asli Tindakan Slip Setoran Bank BCA tanggal 14 Maret 2018 dari No. Rek 2211272980 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI ke No. Rek 5035180149 a.n. CAHNDRA GUNAWAN senilai Rp. 1.721.968.250,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
10. Asli Paspor Republik Indonesia No. A6804057 tanggal 7 November 2013 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.

Hal. 80 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik nomor 1088/Menteng tertanggal 28 Oktober 1994 atas nama Ir. Santoso Halim seluas 664 m2 berlokasi di Jl, Tasikmalaya nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli No: 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No: 05 tanggal 10 Juni 2016 diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3173042805780009 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3172012809110049 a.n. Kepala Keluarga Ir. SANTOSO HALIM.
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 07.653.213.4-033.000 a.n. SANTOSO HALIM.
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Tambahan Sidik Jari (Para) Penghadap a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171072402690007 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171075502730003 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI, NPWP No. 73.654.642.5-077.000 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dan NPWP No. 06.699.380.9-077.000 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 13 Januari 2011 a.n. Kepala Keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.
22. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Nikah No. 717/46/III/1997 tanggal 17 Maret 1997.
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT a.n. Wajib Pajak ARIS SETYANTO NUGROHO tanggal 11 Januari 2016 dengan NOP 31.73.020.001.012.0073.0.
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran Pajak Penjual tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 44.329.140.
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran BPHTB tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 846.000.000.

Hal. 81 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (Modal Kerja dan Investasi) Bank UOB tanggal 22 April 2019.
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2019 tanggal 25 Juli 2019 diterbitkan oleh PPAT R. SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO, S.H., M.Kn.
30. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 1702/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
31. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Kredit Nomor: 69 tanggal 17 November 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor: 54 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
33. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 30 tanggal 7 April 2017 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
34. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 59 tanggal 13 April 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
35. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 73 tanggal 17 Mei 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 19 tanggal 19 Juni 2019 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M berikut fotocopy legalisir lampiran Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia.
37. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 16 tanggal 23 Desember 2020 diterbitkan oleh Notaris NGESTIRINI BASOEKI, S.H.
38. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir minuta akta dan salinan akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lembar tambahan sidik jari (para) panghadap Nomor Akta 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. SANTOSO HALIM, NIK: 3173042805780009.

Hal. 82 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3172012809110049 an kepala keluarga IR. SANTOSO HALIM.
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta perkawinan No. AK.5000294716 an. SANTOSO HALIM dengan FITRIAGUSTIN TJANDRA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Prov. DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2009.
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP nomor: 07.653.213.4-033.000 an. SANTOSO HALIM.
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. ARIS SETYANTO NUGROHO, NIK: 3171072402690007.
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. RR. NURUL WURYANDANI NIK: 3171075902730003 NPWP nomor: 73.654.642.5-077.000 an. RR. NURUL WURYANDANI, NPWP nomor: 06.699.380.9-077.000 an. ARISSETYANTO NUGROHO.
46. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Nikah dengan nomor: 717/46/III/1997 an. IR ARISSETYANTO NUGROHO dengan RR. NURUL WURYANDANI, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung tanggal 17 Maret 1997.
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3171072401090484 an. kepala keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO Nomor: SK.MAGI-FIN/16/023 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO.
49. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 029/SPK/Jtrust/BDM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ditujukan kepada PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO perihal Surat Penegasan Kredit (SPK).
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penawaran Kredit Nomor: 104/SPK/JTRUST/CBD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
51. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1034/CA/III/17/006 tanggal 20 Maret 2017.
52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 22 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 073/Jtrust/CSME/JKT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Surat Keterangan Lunas.

Hal. 83 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 153/Jtrust/Roya-LBS/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan.
56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penilaian No: FSR/SR-FS/06.0794/2016 tanggal 13 Juni 2016 oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan terhadap rumah tinggal di Jl. Tasikmalaya No.15, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat a.n. SANTOSO HALIM.
57. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat dari KJPP Felix Sutandar & Rekan Ref No: 080/FSR/Spn-Wn/0306 tanggal 03 Juni 2016 perihal lingkup penugasan dan proposal jasa penilaian asset.
58. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 atas nama Ir. SANTOSO HALIM.
59. Print out rekening koran rekening BNI a.n. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 0394357881.
60. 1 (satu) bundel print out rekening koran rekening BCA a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 8780919273.
61. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 003/SOM/MS-ASN/IV/18 tanggal 12 April 2018 perihal Surat Somasi.
62. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 005/SOM/MS-ASN/V/18 tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Somasi II.
63. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 035/SOM/MS-ASN/VII/19 tanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Pengosongan.
64. (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 40 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
65. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 41 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com;
66. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 42 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Hal. 84 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar bagi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya berupa fee dari saksi NURUL WURYANDANI.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit *stroke* hingga kesulitan bergerak yang perlu pengobatan rutin.
- Terdakwa merupakan ulang punggong keluarga.

Mengingat, pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PIETER NARDTY THENU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM SURAT OTENTIK.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PIETER NARDTY THENU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juni 2016.
 2. 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jln. Tasikmalaya No. 15 Menteng-Jakarta Pusat.
 3. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: Set.021/YS/UM/ 01/2016 tanggal 19 Januari 2016;
 4. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana tanggal 15 Nopember 2018 perihal Ucapan Terimakasih;
 5. Asli Surat Rektor Universitas Mercubuana Nomor: 01/294/V/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Dispensasi Mahasiswa Pada Acara Syuting MetroTV "Hari Pendidikan Nasional".
 6. Asli Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 29 Juni 2020;
 7. Asli SPPT-PBB a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO NOP: 31.73.020.001.012-0073.0 tanggal 16 April 2020;

Hal. 85 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: HP.03.03/1108-31.71/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Informasi Atau Status Bidang Tanah;
9. Asli Tindakan Slip Setoran Bank BCA tanggal 14 Maret 2018 dari No. Rek 2211272980 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI ke No. Rek 5035180149 a.n. CAHNDRA GUNAWAN senilai Rp. 1.721.968.250,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
10. Asli Paspor Republik Indonesia No. A6804057 tanggal 7 November 2013 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.
- 11.1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik nomor 1088/Menteng tertanggal 28 Oktober 1994 atas nama Ir. Santoso Halim seluas 664 m2 berlokasi di Jl, Tasikmalaya nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat.
- 12.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Minuta Akta Jual Beli No: 03/2016 tanggal 14 Juni 2016 diterbitkan oleh PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.
- 13.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No: 05 tanggal 10 Juni 2016 diterbitkan oleh Notaris LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.
- 14.1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3173042805780009 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3172012809110049 a.n. Kepala Keluarga Ir. SANTOSO HALIM.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 07.653.213.4-033.000 a.n. SANTOSO HALIM.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Tambahan Sidik Jari (Para) Penghadap a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171072402690007 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3171075502730003 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI, NPWP No. 73.654.642.5-077.000 a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dan NPWP No. 06.699.380.9-077.000 a.n. ARISSETYANTO NUGROHO.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3171072401090484 tanggal 13 Januari 2011 a.n. Kepala Keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 22.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Nikah No. 717/46/III/1997 tanggal 17 Maret 1997.
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Asli SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. ARIS SETYANTO NUGROHO.

Hal. 86 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT a.n. Wajib Pajak ARIS SETYANTO NUGROHO tanggal 11 Januari 2016 dengan NOP 31.73.020.001.012.0073.0.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran Pajak Penjual tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 44.329.140.
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti lunas pembayaran BPHTB tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp 846.000.000.
- 27.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (Modal Kerja dan Investasi) Bank UOB tanggal 22 April 2019.
- 28.1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 a.n. Ir. SANTOSO HALIM.
- 29.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2019 tanggal 25 Juli 2019 diterbitkan oleh PPAT R. SURYAWAN BUDI PRASETIYANTO, S.H., M.Kn.
- 30.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 1702/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
- 31.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Kredit Nomor: 69 tanggal 17 November 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E..
- 32.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor: 54 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E.,
- 33.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 30 tanggal 7 April 2017 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 34.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 59 tanggal 13 April 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 35.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 73 tanggal 17 Mei 2018 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M.
- 36.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 19 tanggal 19 Juni 2019 diterbitkan oleh Notaris Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., M.M berikut fotocopy legalisir lampiran Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia.
- 37.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit No: 16 tgl. 23 Desember 2020 diterbitkan oleh Notaris NGESTIRINI BASOEKI, S.H.
- 38.1 (satu) bendel fotokopi legalisir minuta akta dan salinan akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn.

Hal. 87 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar fotokopi legalisir lembar tambahan sidik jari (para) panghadap Nomor Akta 05 tanggal 10 Juni 2016 dihadapan Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, S.H., M.Kn
- 40.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. SANTOSO HALIM, NIK: 3173042805780009.
- 41.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3172012809110049 an kepala keluarga IR. SANTOSO HALIM.
- 42.1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta perkawinan No. AK.5000294716 an. SANTOSO HALIM dengan FITRIAGUSTIN TJANDRA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Prov. DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2009.
- 43.1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP nomor: 07.653.213.4-033.000 an. SANTOSO HALIM.
- 44.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. ARIS SETYANTO NUGROHO, NIK: 3171072402690007.
- 45.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. RR. NURUL WURYANDANI NIK: 3171075902730003 NPWP nomor: 73.654.642.5-077.000 an. RR. NURUL WURYANDANI, NPWP nomor: 06.699.380.9-077.000 an. ARISSETYANTO NUGROHO.
- 46.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Nikah dengan nomor: 717/46/III/1997 an. IR ARISSETYANTO NUGROHO dengan RR. NURUL WURYANDANI, SE yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipayung tanggal 17 Maret 1997.
- 47.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK No. 3171072401090484 an. kepala keluarga ARIS SETYANTO NUGROHO.
- 48.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO Nomor: SK.MAGI-FIN/16/023 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO.
- 49.1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 029/SPK/Jtrust/BDM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ditujukan kepada PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO perihal Surat Penegasan Kredit (SPK).
- 50.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penawaran Kredit Nomor: 104/SPK/JTRUST/CBD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
- 51.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1034/CA/III/17/006 tanggal 20 Maret 2017.
- 52.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 22 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
- 53.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2017 diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.

Hal. 88 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 073/Jtrust/CSME/JKT/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Surat Keterangan Lunas.
- 55.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat JTRUST BANK Nomor: 153/Jtrust/Roya-LBS/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan.
- 56.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Penilaian No: FSR/SR-FS/06.0794/2016 tanggal 13 Juni 2016 oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan terhadap rumah tinggal di Jl. Tasikmalaya No.15, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat a.n. SANTOSO HALIM.
- 57.1 (satu) bendel fotokopi legalisir surat dari KJPP Felix Sutandar & Rekan Ref No: 080/FSR/Spn-Wn/0306 tanggal 03 Juni 2016 perihal lingkup penugasan dan proposal jasa penilaian asset.
- 58.1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1088/Menteng tanggal 28 Oktober 1994 atas nama Ir. SANTOSO HALIM.
59. Print out rekening koran rekening BNI a.n. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 0394357881.
- 60.1 (satu) bundel print out rekening koran rekening BCA a.n. R.R. NURUL WURYANDANI dengan No. Rek 8780919273.
61. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 003/SOM/MS-ASN/IV/18 tanggal 12 April 2018 perihal Surat Somasi.
62. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 005/SOM/MS-ASN/V/18 tanggal 15 Mei 2018 perihal Surat Somasi II.
63. Fotokopi legalisir Surat Law Firm MARIA SILALAH, S.H, ACHMAD FAISAL, S.H & PARTNERS Nomor: 035/SOM/MS-ASN/VII/19 tanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Pengosongan.
64. (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 40 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.
- 65.1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 41 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com;
- 66.1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 42 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Notaris VERONICA NATAADMADJA, S.H., M.Corp Admin., M.Com.

Hal. 89 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. dan SAMUEL GINTING,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYAFRINAINI,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MONICA SEVI HERAWATI,SH., Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

SAMUEL GINTING,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRINAINI,SH.,MH

Hal. 90 dari 90 Halaman Putusan Pidana Nomor 467/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.